LAPORAN KINERJA

Tahun 2026

Triwulan I

Direktorat Pemberdayaaan Usaha
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2026.

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2026 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2026 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pemberdayaan Usaha. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang investasi dan keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha ke depan.

Jakarta, 14 Januari 2026

Direktur Pemberdayaan Usaha

Catur Sarwanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama Tahun 2026 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP selama Tahun 2026, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2026 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis dalam meningkatkan investasi kelautan dan perikanan dan meningkatkan UMKM Pengolah produk kelautan dan perikanan naik kelas. Namun demikian, seiring dengan adanya perubahan arah kebijakan pada tingkat kementerian, pada periode Triwulan I Tahun 2026 dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha guna memastikan keselarasan antara sasaran, indikator kinerja, dan kebijakan strategis yang ditetapkan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Usaha dan Investasi dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja.

Dari 9 indikator kinerja, terdapat 3 indikator yang bisa dilakukan pengukurannya pada triwulan I 2026, sesuai target yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan pengukuran pada akhir periode triwulan I tahun 2026, hasil pengukuran tersebut ke-3 indikator kinerja telah mencapai target triwulan I tahun 2026, hanya indikator kinerja nilai investasi kelautan dan perikanan yang secara prognosa diperkirakan terealisasi sebesar 100%. Dengan capaian dimaksud, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2026 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 108,42%.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

1. Dari 9 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 5 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 3 indikator kinerja bersifat triwulanan.
2. Sebanyak 5 indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (2) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (3) Nilai penilaian mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (4) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pemberdayaan Usaha dan (5) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha.
3. Sebanyak 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP.
4. Sedangkan 3 indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan, (2) Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Omsetnya, (3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha.
5. Pencapaian realisasi indikator kinerja Triwulan I Tahun 2026 adalah (1) Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan diperkirakan mencapai Rp 3,49 Triliun atau dengan kata lain tercapai 100% dari target triwulan I tahun 2026 (2) Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Omsetnya telah terealisasi sebesar 0,7% atau tercapai 140% dari target triwulan I tahun 2026; (3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, tercapai 100% atau dengan kata lain tercapai 105,26% dari target triwulan I tahun 2026.

Pada Tahun 2026, anggaran Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah sebesar Rp 6.518.952.000,-. Penyerapan anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp 1.283.462.840,- atau setara dengan 19,68% terhadap pagu anggaran.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah dicapai selama Tahun 2026, serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk

merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing Indikator Kinerja diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, agar kinerja dapat dijalankan lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR TABEL **7**
DAFTAR GAMBAR **8**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Tugas dan Fungsi 2
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia 4
1.5. Permasalahan Utama 6
1.6 Sistematika Penyajian 7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA **9**
2.1. Rencana Strategis 9
2.1.1 Visi 9
2.1.2 Misi 10
2.1.3 Tujuan 11
2.1.4 Sasaran 12
2.1.5 Kebijakan 12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA **22**
3.1. Capaian Kinerja 22
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja 22
3.2.1 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan 23
IK1. Nilai investasi kelautan dan perikanan 23
3.2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas 43
IK2. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Omsetnya (Persen) 43
3.2.3 Sasaran Strategis 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 67
IK3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen) 67
IK4. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen) 68
IK5. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai) 68
IK6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai) 69

IK7. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks) 70
IK8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai) 71
IK9. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi) 71
BAB IV. PENUTUP 73
4.1 Kesimpulan 73
4.2 Rekomendasi 74
LAMPIRAN.....75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2026 20
Tabel 2. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025 23
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 24
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha dan Investasi pada Triwulan I Tahun 2026 39
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Fasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran pada Triwulan I Tahun 2026 39
Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Fasilitasi Pelaku Usaha yang didampingi dalam rangka Realisasi Investasi pada Triwulan I Tahun 2026 41
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya Triwulan I Tahun 2026.....44
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Kemitraan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan (Kesepakatan) pada Triwulan I Tahun 2026.....49
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Peningkatan kapasitas Lembaga usaha KP pada Triwulan I Tahun 2026 54
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina pada Triwulan I Tahun 2026 59
Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Fasilitasi Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Kredit Program pada Triwulan I Tahun 2026 66
Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025 67
Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2026 69
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2026 70
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2026....72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja 4
Gambar 2. Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan 5
Gambar 3. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin 5
Gambar 4. Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan 6
Gambar 5. Visi Indonesia Emas 2045 9
Gambar 6. Dashboard Nilai NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwuan I Tahun 2026 22
Gambar 7. Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan I Tahun 2025-2026 25
Gambar 8. Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi dengan DPMPTSP Jawa Barat .27
Gambar 9. Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi dengan DPMPTSP Jawa Barat .29
Gambar 10. Koordinasi Pembahasan Pemetaan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 dengan Unit Kerja Lingkup KKP 30
Gambar 11. Rapat Koordinasi Pemetaan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 32
Gambar 12. Diskusi Publik Panel Potensi Ekonomi Strategis Natuna (Sektor Unggulan Peluang Investasi Dan Dukungan Pemerintah) 33
Gambar 13. Penyusunan Model Bisnis Pemindangan Ikan dalam Mendukung Operasionalisasi KDKMP Cukanggenteng, Bandung 35
Gambar 14. Operasionalisasi KDKMP Cukanggenteng, Kab. Bandung melalui Kemitraan dengan Sentra Pemindangan Ikan Desa Cukanggenteng 37
Gambar 15. Penyusunan Model Bisnis Hilirisasi Perikanan Kabupaten Gresik Mendukung Operasionalisasi KDKMP Pangkahkulon dan KDKMP Pangkahwetan 38
Gambar 16. Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan 40
Gambar 17. Fasilitasi Pelaku Usaha yang didampingi dalam rangka Realisasi Investasi (Timja Perizinan) 43
Gambar 18. Inisiasi Peluang Kemitraan antara Koperasi Desa Merah Putih Tongke - Tongke dengan CV. Bhumiagri Nawasena Perkasa pada tanggal 10 Februari 2026 46
Gambar 19. Inisiasi Peluang Kemitraan antara Koperasi Desa Merah Putih Cikiruhwetan Kecamatan Cikeusik dengan Koperasi Produsen Mina Muara Sejahtera pada tanggal 11 Februari 2026.....48
Gambar 20. Monitoring dan Evaluasi Operasional Koperasi Desa Merah Putih Mekarmukti Cihampelas pada tanggal 8 Januari 2026 51
Gambar 21. Monitoring dan Evaluasi Operasional Koperasi Desa Merah Putih Mekarsari Kecamatan Cipongkor pada tanggal 9 Januari 2026 53
Gambar 22. Bimbingan Teknis Tata Kelola Usaha Rantai Dingin yang Efesien dan Berkelanjutan pada tanggal 4 Februari 2026.....54
Gambar 23. Business Matching UMKM Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Retail Modern 56
Gambar 24. Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Permodalan.....57

Gambar 25. Bimbingan Teknis di Kab. Aceh Timur, Aceh 57
Gambar 26. Bimbingan Teknis di Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat 58
Gambar 27. Bimbingan Teknis di Kab. Lampung Tengah, Lampung 59
Gambar 28. Peningkatan Komptensi Pemberdayaan Usaha 63
Gambar 29. Temu Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Bandung.....64
Gambar 30. Training of Trainers (ToT) dalam rangka Uji Coba Modul Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan.....65
Gambar 31. Webinar Nasional “Dari Literasi Keuangan ke Pasar Digital: Strategi Usaha Perikanan Naik Kelas” Kerja Sama dengan Shopee 66
Gambar 32. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 31 Desember 2025 68

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality*, *safe*, *traceable*, *high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2026. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2026 adalah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Triwulan I Tahun 2026 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

1.3. Tugas dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi agar terwujud organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, dan adanya persetujuan tertulis dari Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 176 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Prasarana dan Sarana

c. Direktorat Pemberdayaan Usaha;
d. Direktorat Pengolahan;
e. Direktorat Pemasaran; dan
f. Direktorat Akses dan Promosi.

Selanjutnya dalam Pasal 187 Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi

pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan; dan

f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemberdayaan Usaha.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia atau pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2026 berjumlah 55 orang, yang terdiri atas 42 orang Aparatur Sipil Negeri (ASN), 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan 2 orang Pegawai dengan status Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang tersebar di 6 Tim Kerja dan 1 Subbag Tata Usaha, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, meliputi Direktur sebanyak 1 orang, Tim Kerja Pemetaan Usaha dan Investasi sebanyak 7 orang; Tim Kerja Perizinan dan Pendampingan Investasi sebanyak 7 orang; Tim Kerja Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan sebanyak 8 orang; Tim Kerja Kewirausahaan sebanyak 7 orang; Tim Kerja Kelembagaan dan Kemitraan Usaha sebanyak 7 orang; Tim Kerja Kurasi Usaha sebanyak 7 orang; dan Subbag Tata Usaha sebanyak 11 orang.

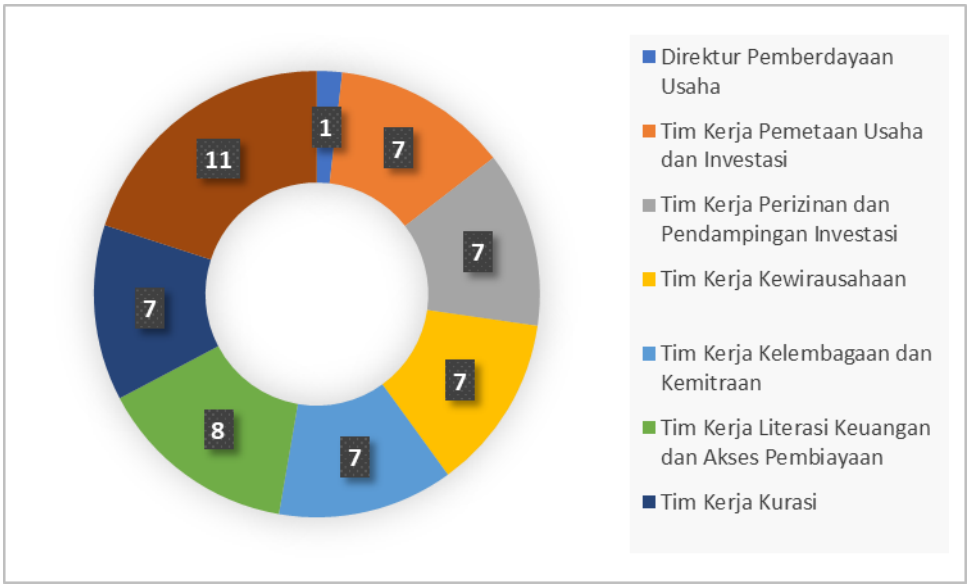

Gambar 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

2. Jumlah pegawai menurut golongan khusus ASN, meliputi golongan IV sebanyak 13 orang, golongan III sebanyak 27 orang, golongan II sebanyak 2 orang dan Non Golongan sebanyak 13 orang. Menurut golongannya, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha terbanyak pada golongan III, yakni 49%.

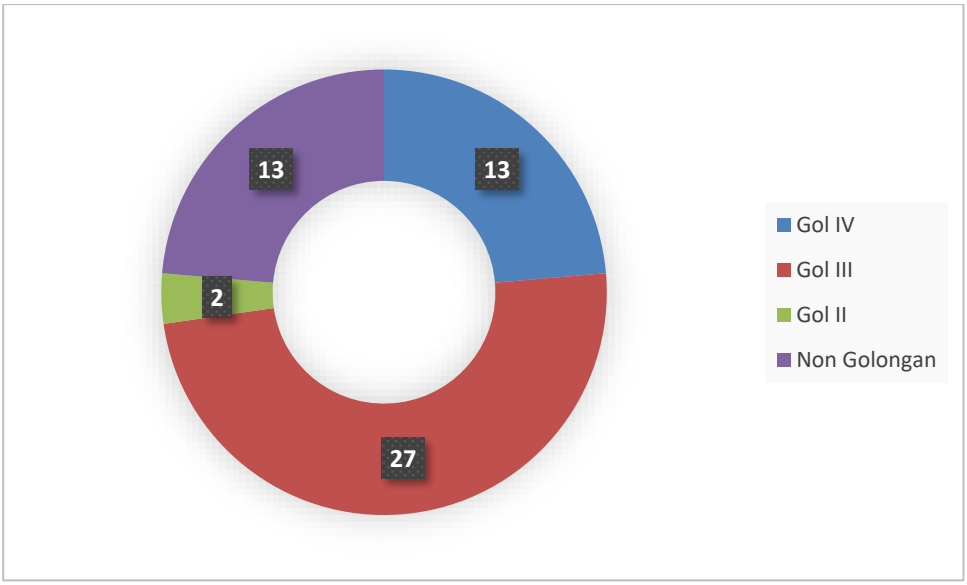

Gambar 2. Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan

3. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, meliputi laki-laki sebanyak 33 orang, atau 60% dari total pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, dan perempuan sebanyak 22 orang, atau 40% dari total pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha.

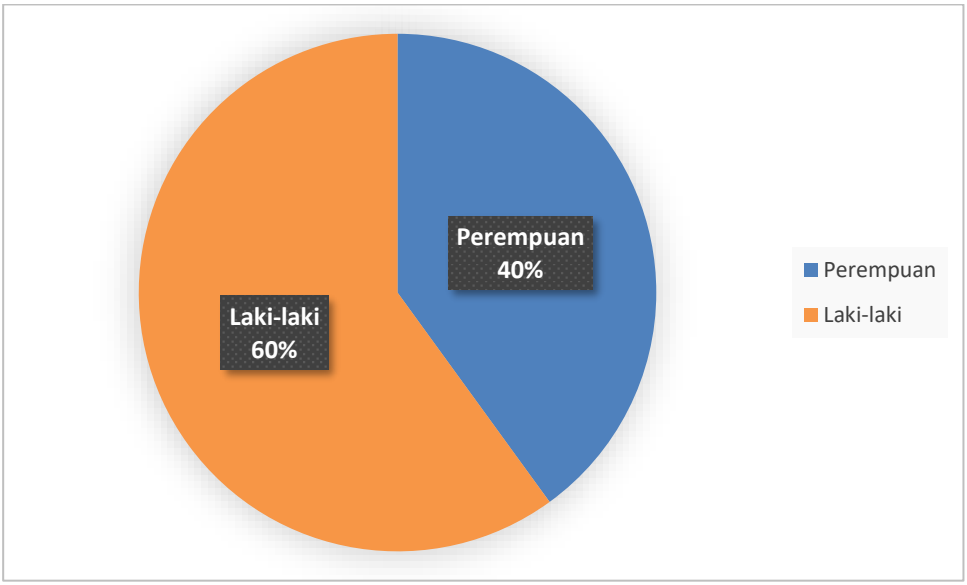

Gambar 3. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

4. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, meliputi S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 20 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 7 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha terbanyak dengan tingkat pendidikan S1, yakni mencapai 41%.

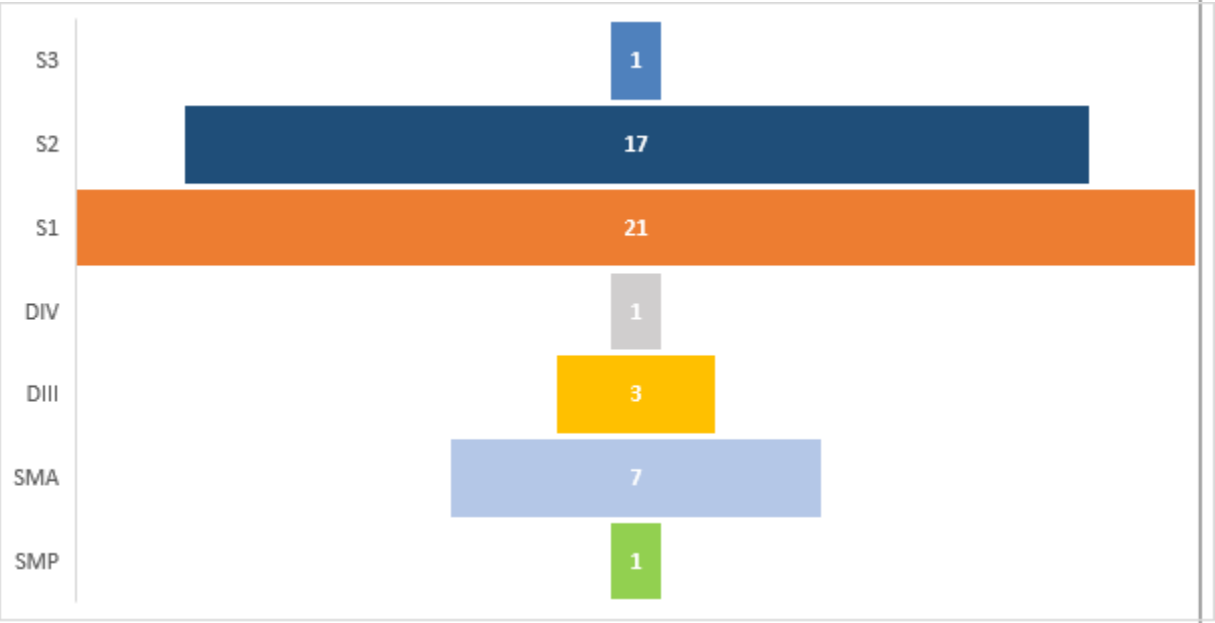

Gambar 4. Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan hilirisasi industri melalui upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pengolahan, akses modal terbatas, rantai pasok belum efisien, kualitas SDM dan teknologi yang kurang memadai, rendahnya nilai tambah produk, akses pasar terbatas dan lemahnya branding, dan kebijakan dan kordinasi yang belum sinkron.

Dari sisi pemanfaatan potensi sumberdaya, berbagai upaya untuk peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan perlu terus dilakukan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain, kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha mikro-kecil dan usaha menengah-besar, dan akses terhadap sumberdaya (modal, teknologi, sarpras, tenaga kerja) juga perlu mendapatkan perhatian.

Dampak kondisi perekonomian nasional saat ini terhadap perkembangan sektor usaha kelautan dan perikanan sangat signifikan karena sektor ini sangat bergantung pada stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal, perdagangan, dan daya beli masyarakat, utamanya bagi pelaku usaha mikro kecil. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang

mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, agar kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Penyediaan informasi peluang investasi usaha di sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan (*ready to offer*).
2. Pelayanan kemudahan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
3. Penguatan korporasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam kerangka *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
4. Fasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5. Fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan literasi utamanya tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP selama Triwulan I Tahun 2026. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2026 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja *(Performance Plan*) Triwulan I Tahun 2026 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja *(performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja;

2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Pemberdayaan Usaha, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2026;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran**.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha menginduk pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) yang dituangkan dalam rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Renstra Ditjen PDSPKP) Tahun 2025-2029. Dokumen renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif terkait pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan pada lima tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu

"Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan".

Gambar 5. Visi Indonesia Emas 2045

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) **transformasi ekonomi,** dan (b) **ketahanan sosial budaya dan ekologi.** Dukungan tersebut akan dikuatkan dengan strategi sebagai berikut : (a) Hilirisasi Penangkapan Ikan berbasis komoditas unggulan, (b) Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, (c) Peningkatan tata kelola dan kinerja sistem logistik ikan nasional termasuk pengembangan sistem telusur logistik ikan nasional, (d) Pengembangan industri

pengolahan dan pemasaran untuk mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, (e) Meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan, (f) Penguatan pasar dalam negeri melalui peningkatan akses kemudahan Masyarakat dan (g) Penguatan pasar luar negeri.

2.1.2 Misi

Misi Ditjen PDSPKP akan mendukung Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden (Bab 1) serta Misi KKP yang mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam rancangan RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan 7 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **"Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan"** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 8**, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
2. **"Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan"** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan **Misi Asta Cita 6**, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
3. **"Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan"** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 3**, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dan **Misi Asta Cita 5**, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
4. **"Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan"**

yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; dan

5. **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas"** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 7**, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Dari lima misi KKP tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung tiga misi, yaitu:

(a) Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan,

(b) Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan

(c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

2.1.3 Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2025-2029. Mengacu rancangan Renstra KKP tahun 2025-2029, ada lima tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, yaitu:

a. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;

b. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;

c. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;

d. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan

e. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik

Dari lima tujuan tersebut, yang menjadi tujuan dari pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah **"meningkatkan mutu dan daya saing**

hasil produk kelautan dan perikanan". Tujuan pembangunan tersebut akan dicapai melalui program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selama tahun 2025-2029.

2.1.4 Sasaran

Sasaran strategis (SS) pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai *outcome/impact* dari program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025-2029. Sebagai organisasi di bawah KKP, sasaran strategis Ditjen PDSPKP melekat pada sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:

- SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi, Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut
- SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan Perikanan
- SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
- SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
- SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

Dari lima sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung secara langsung dua sasaran strategis, yaitu: **SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan**, dan **SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas**.

2.1.5 Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional pada Bagian A dan kebijakan KKP pada Bagian B, maka perlu disusun beberapa target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029. Penyusunan target capaian ini juga memperhatikan agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, sasaran strategis KKP yang didukung Ditjen PDSPKP, serta tujuan pembangunan PDSPKP tahun 2025-2029 yang disampaikan pada Bab 2. Terkait agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, Ditjen PDSPKP mendukung agenda transformasi ekonomi dan agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Pada agenda **transformasi ekonomi**, yang didukung oleh Ditjen PDSPKP adalah:

- ❖ IE 4: Iptek inovasi dan produktivitas ekonomi, yaitu untuk agenda yang berkaitan dengan:
  - Pengembangan UMKM kelautan dan perikanan tembus pasar global
  - Kemudahan akses pembiayaan
- ❖ IE 7: Integritas ekonomi domestik global, yaitu untuk agenda yang berkaitan dengan:
  - Peningkatan investasi asing serta integrasi produk KP pada skema GPN
  - Penguatan sistem logistik ikan nasional
  - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung hilirisasi
  - Transformasi digital pemasaran produk dan jasa ekosistem kelautan dan perikanan

Selanjutnya pada agenda **ketahanan sosial budaya dan ekologi**, yang didukung oleh Ditjen PDSPKP adalah:

- ❖ IE 16: Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
  - Penyediaan sistem rantai dingin yang merata
  - Pengembangan pangan akuatik (*blue foods*)
  - Penanganan *stunting* melalui kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

Dengan memperhatikan semua arahan tersebut, maka target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 yang kemudian menjadi arah kebijakan Ditjen PDSPKP pada tahun 2025-2029, dinyatakan:

"Kebijakan PDSPKP : **Mewujudkan produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berdaya saing di pasar domestik dan ekspor"**

Kebijakan dan strategi tersebut nantinya akan diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan yang berbasis ekonomi biru, sehingga mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Program dan kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 tersebut adalah:

a. **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.**

- ❖ Kegiatan PDSDKP-1: Prasarana dan Sarana hasil kelautan dan perikanan

- Kegiatan PDSDKP-2: Investasi dan Keberlanjutan Usaha Kelautan dan Perikanan
- Kegiatan PDSDKP-3: Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
- Kegiatan PDSDKP-4: Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
- Kegiatan PDSDKP-5: Akses dan Promosi Kelautan dan Perikanan

b. **Program Dukungan Manajemen**. Program ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk KP tahun 2025-2029, yaitu:

- Kegiatan PDSDKP-6: Dukungan Manajemen Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Adapun strategi pelaksanaan untuk kebijakan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah:

1. **Pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi**

   Mengidentifikasi dan menganalisa potensi dan peluang **usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan** sehingga potensi dan peluang tersebut dapat dipetakan dan siap ditawarkan kepada para calon pelaku usaha atau investor.

   Langkah operasional yang perlu diupayakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

   1) Identifikasi potensi pemberdayaan usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan hasil perikanan pada suatu kawasan atau wilayah
   2) Analisa potensi usaha dan investasi menjadi satu peluang usaha dan investasi komoditas unggulan pada suatu kawasan atau wilayah yang siap ditawarkan kepada calon pelaku usaha atau investor
   3) Pemetaan peluang usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan hasil perikanan

2. **Fasilitasi Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Usaha Kelautan Dan Perikanan**

   1) Literasi Keuangan

      Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan

keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- Identifikasi tingkat literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- Analisa intervensi yang dibutuhkan untuk masing-masing tingkatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- Penyusunan bahan dan materi sosialisasi dan edukasi sesuai dengan tingkatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Sosialisasi dan edukasi bahan dan materi literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Penyelenggaraan bimbingan teknis literasi keuangan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Pendampingan literasi keuangan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan

2) Akses Pembiayaan

Kegiatan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan pelaku usaha dapat mengakses sumber pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan, serta menjalin kemitraan yang menguntungkan untuk memperluas skala bisnis mereka. Dengan kemudahan akses pembiayaan dan kemitraan, diharapkan usaha kecil dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, langkah-langkah untuk peningkatan akses melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro, dan dana bergulir adalah:

- Identifikasi calon debitur potensial berbasis kelas UMKM dan/atau data KUSUKA
- Fasilitasi akses pembiayaan usaha kelautan dan perikanan
- Pembinaan klaster pembiayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Pembentukan Pokja Kredit Program melibatkan lembaga penyalur kredit program

- Sinergi mendukung program prioritas KKP dalam hal fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha sektor kelautan dan perikanan
- Penyusunan juknis penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan
- Penyusunan laporan kebutuhan pembiayaan usaha
- Evaluasi kebutuhan pembiayaan oleh Tim Pokja Kredit Program
- Penetapan kelayakan pembiayaan dan jenis kredit yang diberikan
- Pendampingan akses pembiayaan oleh tenaga pendamping atau penyuluh perikanan
- Fasilitasi penyaluran kredit melalui lembaga penyalur kredit program Pemerintah
- Analisis dampak pelaku usaha penerima kredit program

3. **Fasilitasi Pendampingan Kewirausahaan dan Pembentukan Wirausaha Baru Bidang Pengolahan dan Pemasaran**

   Kegiatan ditujukan untuk: (a) menumbuhkan jiwa dan motivasi berwirausaha, (b) menciptakan wirausaha baru produk KP yang inovatif dan kreatif, (c) meningkatkan kapasitas wirausaha yang akan naik kelas, (d) membentuk wirausaha berkarakter kuat dan handal, dan (e) Penguatan kapasitas usaha menuju wirausaha mapan dan calon wirausaha ekspor.

   Sasaran **penumbuhan usaha** baru adalah siswa/purna siswa sekolah menengah atas/kejuruan, mahasiswa/alumni perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sedangkan **sasaran pendampingan** wirausaha adalah pelaku usaha/wirausaha yang membutuhkan pendampingan usaha. **Langkah-langkah** yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan wirausaha kelautan dan perikanan adalah:

   1. Sosialisasi kewirausahaan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang wirausaha dan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam berwirausaha.
   2. Analisis kebutuhan untuk menggali informasi terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh calon wirausaha dalam membangun sebuah usaha
   3. Seleksi calon wirausaha yang benar-benar berminat dan tidak beralih ke pekerjaan lain
   4. Pelatihan peningkatan kapasitas calon wirausaha/wirausaha yang akan naik kelas.

4. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Usaha dan Kemitraan Usaha

1. Kelembagaan Usaha

   Fasilitasi pengembangan kelembagaan menjadi titik awal untuk membangun ekosistem usaha dalam mendorong pengembangan dan keberlanjutan usaha yang berdaya saing. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaku usaha agar mampu meningkatkan efesiensi biaya dan meningkatkan posisi tawar sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan pelaku usaha. Sasaran pengembangan kelembagaan usaha adalah pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan. Target dari kegiatan fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha adalah transformasi kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang mandiri dan berkelanjutan.

   Langkah operasional yang dilakukan dalam pelaksanaan pengembangan kelembagaan usaha meliputi :

   1) Penyadartahuan pelaku usaha terhadap status lembaga usaha berbadan hukum
   2) Fasilitasi pembentukan lembaga usaha berbadan hukum
   3) Identifikasi pelaku usaha yang berpotensi ditingkatkan kapasitas kelembagaan usahanya
   4) Perumusan model kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang sesuai di kawasan pengembangan
   5) Penguatan kelembagaan usaha melalui serangkaian kegiatan pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis
   6) Pengembangan kelembagaan usaha berbasis korporasi
   7) Pembentukan dan pembinaan lembaga inkubator bisnis
   8) Pengembangan usaha di dalam dan luar kawasan usaha
   9) Monitoring dan evaluasi kinerja lembaga usaha

2. Kemitraan

   Fasilitasi ditujukan untuk mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi dengan membentuk jaringan kerjasama antara koperasi, UMKM dan

usaha besar, usaha hulu dan usaha hilir dengan tujuan yang sama untuk menjalankan suatu bisnis dan mencari keuntungan.

Langkah operasional pelaksanaan fasilitasi kemitraan meliputi :

1. Identifikasi kebutuhan kemitraan
2. Fasilitasi dan pendampingan usaha perikanan sektor hulu (tangkap dan budidaya) untuk bermitra dengan usaha hilir (pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)
3. Fasilitasi kerjasama usaha mikro kecil dan koperasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan dengan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
4. Fasilitasi kerjasama UMKM hasil kelautan dan perikanan dengan BUMN dalam rangka mengakses Program Kemitraan BUMN
5. Fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk bermitra dengan distributor dan jaringan pemasaran digital.

5. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan Serta Pendampingan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan

Perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sistem perizinan berusaha saat ini dilaksanakan berbasis risiko, *post audit* dan terintegrasi dalam *Online Single Submission* (OSS). Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Pemberdayaan Usaha mendapatkan mandat melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen untuk setiap pelaku usaha dengan status PMA.

Tujuan utama fasilitasi pelayanan perijinan berusaha adalah memberikan keterbukaan akses informasi kepada pelaku usaha perihal persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu perijinan serta melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dengan harapan pelaku usaha mendapatkan pelayanan yang terbaik dan merasakan manfaat atas pelayanan perijinanan yang diberikan. Alur perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran ikan adalah:

1. Mendaftar melalui situs http://oss.go.id untuk mendapatkan akses dengan membuat akun nama pengguna dan kata sandi
2. Memasukkan bidang usaha, nilai investasi serta kelengkapan data pendukung maka sistem akan menerbitkan NIB
3. Sistem OSS RBA akan memverifikasi pengajuan pada tahapan status disetujui, kurang lengkap, atau ditolak
4. Jika mengambil KBLI dengan tingkat risiko menengah rendah izin usahanya terbit otomatis, sedangkan KBLI dengan tingkat berisiko menengah tinggi wajib memiliki NIB dan sertifikat standar
5. Sertifikat standar yang telah terverifikasi merupakan izin usaha dan bisa digunakan untuk mengurus PB untuk menunjang kegiatan usaha (UMKU) untuk operasional dan komersial
6. Kewajiban pelaku usaha setelah perizinan berusaha terbit:
   - Memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kementerian Kelutan dan Perikanan;
   - Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Skala usaha mikro dan kecil paling lama 2 (dua) tahun dan Skala usaha menengah dan besar paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan
   - Membuat laporan kegiatan usaha pengolahan ikan setiap 6 (enam) bulan kepada Penerbit Sertifikat Standar.

Pendampingan investasi dilakukan untuk menindaklanjuti rencana investasi dalam dokumen usulan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen. Selain itu, pendampingan investasi juga dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil promosi peluang investasi kelautan dan perikanan yang berupa minat investasi pada sektor kelautan dan perikanan, baik dari PMA maupun PMDN. Upaya yang dilakukan untuk melakukan fasilitasi pelayanan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen, serta pendampingan investasi adalah:

1. Penyiapan bahan kebijakan pelayanan perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelayanan publik dalam rangka penguatan budaya layanan prima

3. Pendampingan perijinan berusaha, verifikasi dokumen rencana kegiatan usaha dan penerbitan perizinan berusaha
4. Sosialisasi kebijakan perizinan berusaha
5. Pelaksanaan pelayanan perizinan pengolahan ikan, pemasaran ikan, dan jasa pasca panen penangkapan ikan
6. Pendampingan pelaporan kegiatan usaha
7. Verifikasi calon investor yang minat investasi dan/atau memiliki rencana investasi di sektor kelautan dan perikanan
8. Pendampingan calon investor dalam rangka penyelesaian hambatan investasi, fasilitasi perolehan insentif fiskal dan non-fiskal, serta percepatan realisasi investasi
9. Analisis dan pemantauan capaian realisasi usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
10. Sosialisasi dan edukasi tata cara melakukan usaha dan investasi bidang kelautan dan perikanan di Indonesia.
11. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam rangka pengukuran kinerja pelayanan perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2026. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Investasi Kelautan dan Perikanan	1.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	14,47
2.	Meningkatnya UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas	2.	Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Omsetnya (Persen)	5,5
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	3.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		4.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100
		5.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86,2
		7.	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	81,5
		8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	81
		9.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja seluruh level lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2026 pada SAPK dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6. Dashboard Nilai NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwuan I Tahun 2026

NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025 sebesar 108,42% dengan predikat Baik.

Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Tahun 2026 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Tahun 2026, terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja.

Tabel 2. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025

No	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi		
		2026	TW I	Sd TW I	% thd Target TW I	% sd thd Target 2026
1	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	14,47	3,49	3,49	100	24,11
2	Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Omsetnya (Persen)	5,5	0,5	0,7	140	12,72
3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95	95	100	105,26	105,26
4	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100	-	-	-	-
5	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75	-	-	-	-
6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86,2	-	-	-	-
7	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	81,5	-	-	-	-
8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	81	-	-	-	-
9	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1	-	-	-	-

3.2.1 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan

IK1. Nilai investasi kelautan dan perikanan

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain: penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan

investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP, diantaranya yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi komoditas unggulan, dan Penangkapan Ikan Terukur, serta mendukung peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Nilai investasi KP dihitung melalui penjumlahan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari data yang telah diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan nilai Kredit Investasi yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nilai investasi dari Kredit Investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang yang berasal dari Lembaga Keuangan, yakni perbankan dan non perbankan. Realisasi dari kredit investasi mengakomodir investasi masyarakat yang berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	S.d Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026
Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	3,49	1,66	14,47	3,49	3,00	3,49	100	116,33	24,11

Ket : * Angka Prognosa

Realisasi investasi KP pada triwulan I tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp 3,49 triliun, yakni 100% dari target triwulan I tahun 2026 sebesar Rp3,49 triliun, terdiri dari PMA Rp 0,8 triliun, PMDN Rp 1,69 triliun dan kredit investasi sebesar Rp 0,92 triliun. Sebagaimana Tabel 4 apabila dibandingkan dengan target tahun 2026 yakni sebesar Rp 14,47 triliun mencapai 24,11%. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 3,00 triliun, maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 116,33%.

Realisasi investasi KP pada triwulan I tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp3,49 triliun, yakni tercapai 100,02% jika dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2026 sebesar Rp3,49 triliun, atau mencapai 24,12% jika dibandingkan dengan target tahun 2026 yakni Rp14,47 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama

tahun sebelumnya yaitu triwulan 1 tahun 2025 sebesar Rp3 triliun maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 16,33%.

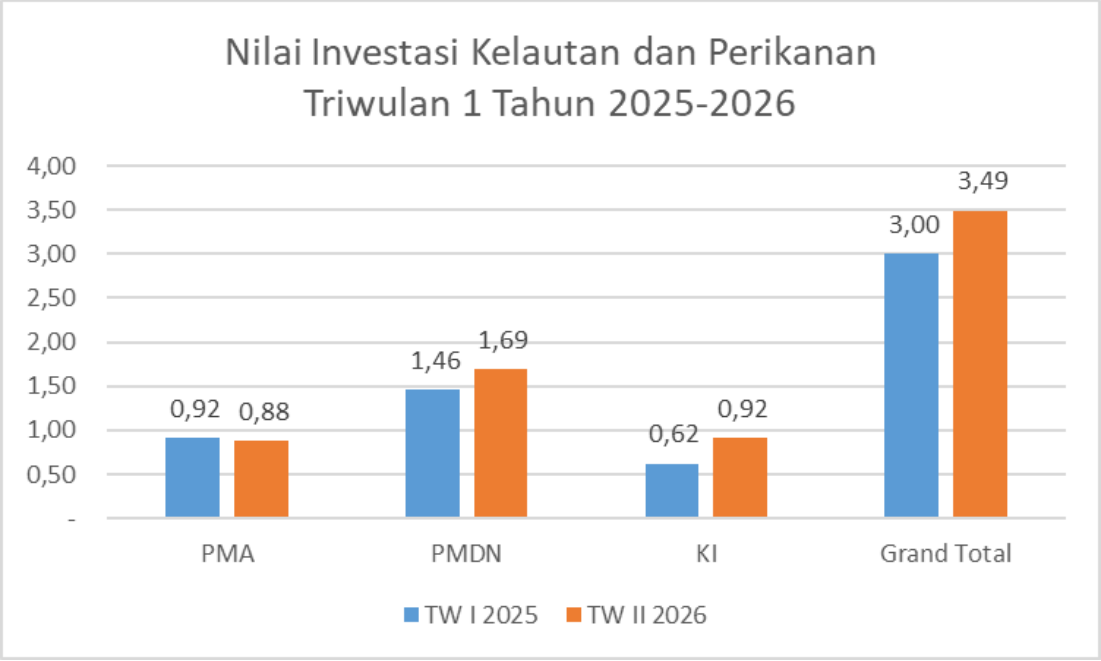

Gambar 7. Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan I Tahun 2025-2026

Ket: *) angka prognosa

Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, diolah Ditjen PDS

Realisasi investasi pada triwulan I tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp3,49 triliun yang terdiri dari PMA sebesar Rp0,88 Triliun, PMDN sebesar Rp1,69 Triliun dan Kredit Investasi (KI) sebesar Rp0,92 Triliun. PMA diperkirakan mengalami sedikit perlambatan 3,96% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp0,92 Triliun, sedangkan PMDN diperkirakan meningkat sebesar 15,92% dari periode yang sama tahun sebelumnya triwulan I tahun 2025 sebesar Rp1,46 Triliun dan KI diperkirakan meningkat sebesar 47,04% dari periode yang sama tahun sebelumnya triwulan I tahun 2025 sebesar Rp0,62 Triliun..

Direktorat Pemberdayaan Usaha telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.518.952.000,-. Penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp956.378.068.- atau setara dengan 14,67% terhadap total pagu anggaran awal.

Indikator Kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan didukung oleh beberapa Rincian Output Keigatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2026 sebagaimana berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha dan Investasi

1) Hilirisasi Hasil Revitalisasi Tambak Pantura melalui Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Pengolahan Nila Salin dengan DPMPTSP Jawa Barat

Dalam rangka mendukung peningkatan nilai investasi sektor kelautan dan perikanan, telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi pada tanggal 8 Januari 2026 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. Hasil koordinasi tersebut antara lain:

1) Ketua Tim Kerja Pemetaan Usaha dan Investasi menyampaikan bahwa berdasarkan berdasar tugas dan fungsi Timja Pemetaan Usaha dan Investasi, Direktorat Pemberdayaan Usaha, output yang akan ditargetkan untuk dicapai pada kegiatan tahun 2026 fokus pada: (a) Penyusunan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan yang siap ditawarkan kepada calon investor (*Investment Project Ready to Offer* / IPRO); (b) Pengembangan Kawasan Usaha Hilirisasi KP; dan (b) Penyusunan Modeling Bisnis Kelautan dan Perikanan.
2) Tujuan utama koordinasi dengan DPMPTSP Jawa Barat adalah untuk: (1) mendapatkan masukan dan saran terkait rencana penyusunan IPRO pengembangan industri hilirisasi nila salin dalam rangka mendukung program prioritas KKP, yaitu revitalisasi tambak wilayah pantura seluas 20.000 ha; (2) mendapatkan Informasi terkait hasil dan tindak lanjut kegiatan *West Java Investment Summit* (WJIS) 2025; serta (3) mendapatkan informasi terkait data IPRO komoditas perikanan di wilayah Jawa Barat yang bisa dikolaborasikan dengan KKP.
3) DPMPTSP Jawa Barat menyampaikan :
   (a) Lokasi IPRO pengembangan hilirisasi nila salin disarankan berada di wilayah Subang dan Indramayu, karena secara umum biaya lahan dan tenaga kerja di wilayah tersebut masih rendah, dukungan infrastruktur yang lengkap, serta merupakan jangkauan kelancaran logistik dan pasokan bahan baku.
   (b) Berdasarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, perikanan merupakan salah satu sektor yang dikembangkan di Jawa Barat

bagian selatan. Wilayah Jabar Selatan yang dimaksud adalah Kabupaten/Kota Garut, Cianjur, Pangandaran, Tasikmalaya, dan Sukabumi. Potensi yang akan dikembangkan adalah budidaya udang vaname dan hilirisasinya.

(c) DPMPTSP Jawa Barat saat ini telah memiliki beberapa IPRO sektor kelautan dan perikanan, antara lain pengembangan industri garam di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat.

(d) DPMPTSP Jawa Barat pernah mendapatkan permintaan dari buyer/investor Jepang yang berminat pada pengembangan produk gelatin dari nila, namun karena ketiadaan data terkait hal tersebut maka DPMPTSP Jawa Barat belum menindaklanjutinya.

4) Berdasarkan rapat koordinasi tersebut Direktorat Pemberdayaan Usaha akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DPMPTSP dan unit kerja terkait di Jawa Barat terhadap rencana pengembangan industri hilirisasi nila salin di wilayah Jawa Barat.

Gambar 8. Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi dengan DPMPTSP Jawa Barat

2. Hilirisasi Kelalutan dan Perikanan melalui Penyiapan Materi Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026 dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Usaha dan dihadiri oleh Bapak Rino Febrian - Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Pengembangan Bisnis dan Valuasi Ekonomi Bidang Kelautan, perwakilan dari Direktorat Akses dan Promosi serta pegawai lingkup

Direktorat Pemberdayaan Usaha. Adapun pokok pembahasan dalam rapat adalah sebagai berikut:

1) Rapat dilatarbelakangi adanya undangan keikutsertaan Indonesia pada Forum Investasi di Shenzhen, Guandong, China. Pertemuan tersebut terkonfirmasi akan dihadiri lima perusahaan China yang bergerak di bidang perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan) dan perusahaan finance. Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Pengembangan Bisnis dan Valuasi Ekonomi Bidang Kelautan akan mewakili KKP untuk hadir dalam forum tersebut;
2) Pada forum tersebut KKP diminta untuk menjelaskan kebijakan dan program Pemerintah Indonesia yang berhubungan dengan sektor kelautan dan perikanan.
3) Misi delegasi Indonesia adalah menawarkan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, terutama pada komoditas unggulan yaitu rumput laut, tuna, udang, lobster, kepiting/rajungan,dan nila;
4) Hasil diskusi dan pembahasan :
   - Bapak Rino Febrian telah berkoordinasi dengan DItjen Perikanan Tangkap dan Biro Perencanaan KKP terkait materi kebijakan sektor kelautan dan perikanan. Bahan yang akan dipresentasikan yaitu terkait potensi perikanan Indonesia, tantangan sektor kelautan dan perikanan tahun 2050, kondisi perikanan dunia, serta kebijakan blue economy;
   - Direktur Pemberdayaan Usaha memberikanan penjelasan terkait mekanisme perizinan PMA dan insentif investasi. Lokus target investasi dengan insentif fiskal dan non fiskal paling banyak yaitu pada lokasi Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
   - Dalam upaya mendorong perkembangan usaha dan investasi di bidang budidaya perikanan, KKP telah melakukan pengembangan bibit ikan unggulan melalui balai budidaya antara lain Balai Budidaya Lampung dan Takalar untuk rumput laut, Balai budidaya Sukabumi untuk ikan tawar, serta Balai budidaya Situbondo dan Bali untuk ikan laut;
   - Perkembangan teknologi budidaya ikan nila di China sudah sangat maju dan bisa memproduksi nila ukuran 600 gram/ekor dalam waktu 3 bulan atau dengan siklus 4 kali per tahun. Tujuan pasar produk ikan nila tersebut Amerika Serikat dan dan Eropa.

5) Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
   - Direktorat Pemberdayaan Usaha bersama Direktorat Akses dan Promosi akan menyiapkan bahan/materi promosi peluang investasi sektor kelautan dan perikanan yang bisa ditawarkan kepada calon investor di China;
   - Direktorat Pemberdayaan Usaha akan menyiapkan pedoman investasi sektor kelautan dan perikanan bagi PMA sebagai bahan dalam Forum Investasi di Shenzhen, Guandong, China.

Gambar 9. Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi dengan DPMPTSP Jawa Barat

3. Operasionalisasi KMNP dan KDMP Penerima Budidaya Tematik melalui Pemetaan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 dengan Unit Kerja Lingkup KKP

Rapat dalam rangka pemetaan usaha dan investasi sektor kelautan dan perikanan tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2026, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh perwakilan Sekretaris Ditjen PDSPKP, perwakilan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap DJPT, Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya DJPB, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan DJPT, Direktorat Ikan Air Tawar DJPB, Direktorat Rumput Laut DJPB, Direktorat Ikan Air Payau DJPB, Direktorat Prasarana dan Sarana DJPB, Direktorat Akses dan Promosi DJPDS serta perwakilan Tim Kerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha. Adapun pokok pembahasan dalam rapat adalah sebagai berikut:

1) Rapat bertujuan untuk: (1) Penyampaian konsep pemetaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan; dan (2) Sinkronisasi lokasi pengembangan hilirisasi kelautan dan perikanan;
2) Beberapa poin hasil pembahasan antara lain :
   - Perwakilan DJPB menyampaikan lokasi pengembangan hilirisasi kelautan dan perikanan yang dapat disinkronisasikan akan dikoordinasikan lebih lanjut,

karena saat ini beberapa kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Budi Daya masih dalam proses pengerjaan, diantaranya

- Perwakilan DJPT menyampaikan lokasi pengembangan hilirisasi kelautan dan perikanan yang dapat disinkronisasikan akan dikoordinasikan lebih lanjut. Saat ini beberapa kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Tangkap khususnya pemberdayaan usaha masih berfokus pada kegiatan KNMP, yaitu:
- Dalam forum disampaikan agar Ditjen Perikanan Budi Daya dapat menyiapkan data geospasial terkait potensi dan produksi budidaya di Indonesia seperti halnya data-data realtime Ditjen Perikanan Tangkap tentang jumlah ikan yang didaratkan serta I-Gemas Ditjen PDS (jumlah dan kapasitas cold storage, angka konsumsi ikan, dll).

3) Sebagai rencana tindak lanjut :

- Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Ditjen Perikanan Budidaya terkait data profiling KDMP Budiaya Tematik sebagai referensi penilaian dan pemilihan lokasi berdasarkan aspek teknis, aspek pemasaran, aspek SDM dan kelembagaan, aspek regulasi, dan dukungan pemerintah serta aspek finansial;
- Akan dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah baik provinsi, Kabupaten/Kota dalam kegiatan pemetaan dan pemberdayaan usaha.

Gambar 10. Koordinasi Pembahasan Pemetaan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 dengan Unit Kerja Lingkup KKP

4. Operasionalisasi KMNP dan KDMP Penerima Budidaya Tematik melalui Koordinasi Pemetaan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 dengan Pemerintah Daerah

Kegiatan dilaksanakan pada 3 Februari 2026 di Ruang Rapat Pemberdayaan Usaha dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Perwakilan Setditjen PDS serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Jawa serta pegawai lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Rapat dilaksanakan dalam rangka (a) Sosialisasi konsep pemetaan usaha dan investasi kelautan dan perikanan; (b) Profiling usaha hasil kelautan dan perikanan secara komunal; dan (c) Sinkronisasi lokasi pengembangan hilirisasi kelautan dan perikanan.

Beberapa hal terkait kegiatan pemetaan dan analisa usaha dan investasi tahun 2026 yang disampaikan kepada peserta rapat antara lain:

1) Modeling bisnis komunal difokuskan pada UMKM kelautan dan perikanan di wilayah Jawa yang dibagi menjadi 4 klaster yaitu:
   - Sentra Pengolahan: pengolahan pindang di Pasirjambu, Kab. Bandung;
   - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP): KDKMP Pangkah Wetan – Gresik, KDKMP Pangkah Kulon - Gresik, dan KDKMP Mlaten - Pasuruan;
   - Kampung Budidaya Tematik: Kab. Magelang (5 lokasi), Kab. Madiun (4 lokasi) dan Kab. Purworejo (4 lokasi);
   - Kelompok Budidaya Perikanan: kelompok budidaya nila salin di Kab. Pati dan kelompok budidaya udang di Kab. Kebumen;
2) Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan ketertarikannya terhadap konsep pemetaan dan analisa usaha dan investasi, serta mengusulkan beberapa lokasi modelling bisnis komunal antara lain Kabupaten Gresik, Kabupaten bekasi, Kabupaten Kulonprogro, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten kebumen.
3) Tindak lanjut dari kegiatan ini Direktorat Pemberdayaan Usaha akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait data profiling usaha kelautan dan perikanan yang diusulkan sebagai lokasi modeling bisnis serta akan segera melakukan identifkasi dan verifikasi lapang pada lokasi yang ditetapkan.

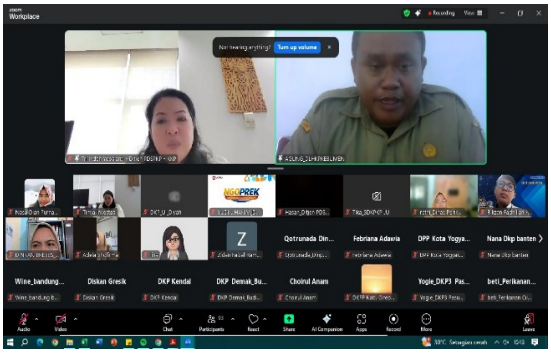

Gambar 11. Rapat Koordinasi Pemetaan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2026

5. **Hilirisasi Kelautan dan Perikanan melalui Diskusi Publik Panel Potensi Ekonomi Strategis Natuna (Sektor Unggulan Peluang Investasi Dan Dukungan Pemerintah)**

   Kegiatan dilaksanakan pada 12 Februari 2026 di Jakarta dihadiri oleh Bupati Natuna dan jajaran OPD, para pelaku usaha/investor, perwakilan kementerian/lembaga dan mitra strategis lainnya. Narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Direktur Pengembangan Wilayah Barat BAPPENAS, Direktur Hilirisasi Perikanan dan Kelautan BKPM, Ketua Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI), Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Natuna dan perwakilan Invest Sea. Beberapa hal dapat dilaporkan dari kegiatan dimaksud :

   1) Kegiatan diinisiasi oleh Invest Sea Indonesia (Investsea) yang merupakan organisasi investasi yang berfokus pada peluang investasi berkelanjutan dan ramah lingkungan di bidang seperti ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah Indonesia.
   2) Forum ini bertujuan mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan sektor unggulan, peluang investasi, dan tantangan tata kelola dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi di Natuna.
   3) Dalam Diskusi publik beberapa hal yang menjadi poin pembahasan :
      - Roadmap RPJMN 2025–2029 menempatkan Natuna sebagai kawasan strategis berbasis komoditas unggulan pertanian dan perikanan, serta sebagai kawasan afirmasi yang memerlukan *special treatment* karena IPM dan tingkat ketimpangan masih di bawah rata-rata nasional.

- Potensi peluang investasi pada komoditas perikanan seperti tongkol dan gurita, serta pengembangan wisata bahari berbasis *underwater attraction* dari bangkai kapal perang yang memiliki nilai diferensiasi tinggi.
- Percepatan investasi di Natuna memerlukan pendekatan yang pragmatis dan berorientasi pada eksekusi cepat, melalui langkah konkret seperti mengundang investor potensial, menyiapkan *investment project* yang jelas, serta memastikan kepastian regulasi dan kemudahan perizinan.
- Pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan perizinan untuk mendukung rencana investasi di Natuna melalui layanan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada kepastian hukum guna meningkatkan kemudahan berusaha, meminimalkan hambatan birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Natuna.

Gambar 12. Diskusi Publik Panel Potensi Ekonomi Strategis Natuna (Sektor Unggulan Peluang Investasi Dan Dukungan Pemerintah)

6. Operasionalisasi KDKMP Cukanggenteng Bandung melalui Penyusunan Model Bisnis Pemindangan Ikan

Kegiatan dilaksanakan pada 25 - 27 Februari 2026 di Bandung dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung yang terdiri dari Kepala Bidang Distribusi dan Kemananan Pangan, Kepala Bidang Usaha Perikanan dan staf; Kepala Desa Cukanggenteng; Penyuluh Perikanan Desa Cukanggenteng; Ketua Bidang Usaha KDKMP Desa Cukanggenteng; Koordinator SPPG Desa Cukanggenteng, Ketua Pokhlasar Pemindangan Ikan Desa Cukanggenteng, suplier bahan baku ikan pindang dari Pasar Caringin, Banjaran dan Bandung Timur, Febri Dirgantara – Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Bisnis, serta Tim Kerja Pemetaan

Usaha dan Investasi - Direktorat Pemberdayaan Usaha. Beberapa hal dapat dilaporkan dari kegiatan dimaksud :

1) Hasil pemetaan usaha hilirisasi pemindangan ikan di Cukanggenteng dan sekitarnya:
   a. KDKMP Desa Cukanggenteng telah memiliki organisasi yang dipimpin oleh Ketua KDKMP dengan satu bidang usaha yang telah berjalan, yaitu usaha penyimpanan dan distribusi ikan bahan baku pemindangan kapasitas 3-4 ton per hari. Desa Cukanggenteng telah memberikan penyertaan modal terhadap unit bisnis KDKMP tersebut senilai Rp50 juta. KDKMP Cukagenteng siap berkolaborasi dalam peningkatan usaha pokhlasar pemindang ikan.
   b. Pelaku usaha pemindangan ikan Desa Cukanggenteng berjumlah 84 orang yang tergabung dalam 8 kelompok dengan rata-rata produksi yaitu: (1) Tiga pemindang masing-masing sebanyak 80-100 kg/hari, dan (2) Delapan puluh satu orang sebanyak 10-15 kg/hari dimana pemindangan dilakukan hanya 3 kali dalam 1 minggu. Area pemasaran di wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Produk utama olahan yaitu ikan pindang bandeng, mas, salem, layang, cakalang dan tongkol.
   c. SPPG Desa Cukanggenteng melayani 2000 siswa dan 500 orang ibu hamil dan menyusui per hari, namun sampai dengan saat ini belum pernah memberikan menu ikan sebagai salah satu menu MBG. Dalam koordinasi dengan SPPG disampaikan bahwa ikan pindang hasil olahan Desa Cukanggenteng diharapkan dapat menjadi salah satu menu MBG di wilayah tersebut.
   d. Supplier bahan baku yang berasal dari Pasar Caringin, Banjaran, dan Bandung Timur menyatakan kesiapan untuk bermitra dan mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku pemindangan ikan di Desa Cukanggenteng, dengan catatan adanya komitmen kerja sama yang jelas dan disepakati bersama.
   e. Kepala Desa Cukanggenteng menyatakan dukungannya dalam pengembangan Sentra Pemindangan Ikan Desa Cukanggenteng agar pindang ikan Desa Cukanggenteng dapat menjadi ikon bisnis desa tersebut yang berdampak pada peningkatan kesejehteraan masyarakat Desa Cukanggenteng.

f. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung mendukung rencana Modeling Bisnis Pemindangan Ikan Desa Cukanggenteng dan akan bersinergi dengan Tim Ditjen PDS dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha.

Gambar 13. Penyusunan Model Bisnis Pemindangan Ikan dalam Mendukung Operasionalisasi KDKMP Cukanggenteng, Bandung

7. Operasionalisasi KDKMP Cukanggenteng melalui Kemitraan dengan Sentra Pemindangan Ikan Desa Cukanggenteng

Kegiatan dilaksanakan pada 12 Maret 2026 di Bandung yang dihadiri Perwakilan Setditjen PDS, Direktorat Akses dan Promosi, Direktorat Pengolahan, Direktorat Sarana dan Prasarana, serta perwakilan Tim Kerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha.

1) Koordinasi dilaksanakan dalam rangka membahas: (1) Draft Model Bisnis Pemindangan Ikan Desa Cukanggenteng; dan (2) Langkah operasionalisasi KDKMP Cukanggenteng melalui kemitraan dengan Sentra Pemindangan Ikan Desa Cukanggenteng;
2) Model Bisnis Pemindangan Ikan Desa Cukanggenteng dan langkah operasionaliasasi KDKMP Cukanggenteng direncanakan sebagai berikut:
   a. Penguatan KDKMP Desa Cukanggenteng sebagai *supplier* bahan baku ikan dan *offtaker* yang mengelola mekanisme pembelian dan distribusi pindang ikan, serta layanan simpan pinjam bagi pelaku usaha pemindangan ikan.
   b. Dari sisi pengembangan usaha, disusun skenario peningkatan kapasitas produksi menjadi tiga kali lipat dengan komposisi 70% untuk penguatan produk eksisting, dan 30% untuk produk premium dengan target peningkatan nilai hingga 300%;

c. Untuk peningkatan produksi dan perluasan pasar, maka diperlukan langkah-langkah:
   - Perbaikan manajemen keuangan, manajemen usaha dan akses permodalan pemindang ikan;
   - Pemenuhan izin usaha, izin edar dan jaminan mutu, seperti NIB, SKP dan Halal.
   - Penyediaan bahan baku ikan yang kontinyu, bermutu baik dan harga rendah dengan KDKMP Cukanggenteng sebagai konsolidatornya;
   - Diversifikasi produk dan kemasan pindang ikan, disesuaikan dengan target pasar yang dituju.
   - Penguatan branding pindang ikan yang merupakan identitas Kabupaten Bandung. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Bandung mengusulkan branding pindang ikan: **Si Pedo Ciwidey** untuk pindang ikan bandeng dan **Cinara Ciwidey** untuk pindang ikan mas.
   - Perluasan akses pasar tradisional, serta peningkatan akses pasar modern di wilayah Jabodetabek, yaitu ke toko oleh-oleh seperti Kartikasari, Primarasa, dan Bolen Lilit, juga ke jaringan minimarket/supermarket, seperti Yomart, Alfamart dan Indomaret;
   - Himbauan konsumsi menu ikan pindang pada setiap kegiatan lingkup OPD Kabupaten Bandung;

3) Beberapa poin hasil pembahasan antara lain:
   a. Apabila kegiatan ini akan diusulkan sebagai program prioritas dari Ditjen PDS, maka perlu disusun secara holistik dan terintegrasi dengan seluruh kegiatan Ditjen PDS. Selain itu usulan juga perlu dikaitkan dengan dukungan terhadap kegiatan prioritas nasional dan prioritas KKP antara lain MBG, KNMP, KDMP, dan *blue economy*;
   b. Perencanaan proyek model bisnis ini perlu melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain sosial ekonomi, budidaya, serta penyuluh perikanan serta perlu disusun *timeline* penyelesaiannya.

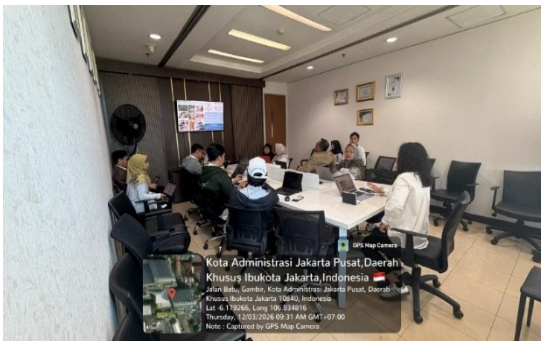

Gambar 14. Operasionalisasi KDKMP Cukanggenteng, Kab. Bandung melalui Kemitraan dengan Sentra Pemindangan Ikan Desa Cukanggenteng

8. **Operasionalisasi KDKMP Pangkahkulon dan KDKMP Pangkahwetan Kabupaten Gresik melalui Penyusunan Model Bisnis Hilirisasi Perikanan**

   Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Maret 2026 yang melibatkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Kepala Bidang Perikanan – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik, Penyuluh Perikanan, Kepala Desa Pangkahkulon, Sekretaris Desa Pangkahwetan, Ketua Koperasi Kampung Perikanan Budidaya Rumput Laut - Pangkahkulon, Ketua KDKMP Pangkahwetan, Ketua KDKMP Pangkahkulon, Kelompok Pengolah Bandeng Pangkahwetan, Kelompok Pengolah Rumput Laut Pangkahkulon, pembudidaya rumput laut Pangkahkulon, perwakilan operator SPPG Ujungkulon, Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Bisnis dan Tim Direktorat Pemberdayaan Usaha. Beberapa hal dapat dilaporkan dari kegiatan dimaksud :

   1) KDKMP Pangkahwetan dan KDKMP Pangkahkulon adalah KDKMP di Kabupaten Gresik dengan 7 usaha wajib dan usaha tambahan di sektor kelautan dan perikanan. KDKMP Pangkahwetan merupakan salah satu KDKMP yang menjadi mockup peresmian KDKMP oleh Presiden Prabowo pada tahun 2025 dengan komoditas unggulannya yaitu ikan bandeng, sedangkan KDKMP Pangkahkulon memiliki komoditas unggulan rumput laut jenis *Gracilaria* sp.;
   2) Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Perikanan serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Gresik mendukung pengembangan KDKMP sesuai dengan potensi usaha masing-masing. Pemkab Gresik siap melakukan pendampingan KDKMP, terutama di Pangkahwetan dan Pangkahkulon.

3) KDKMP Pangkahwetan memiliki sekitar 300 orang anggota, dengan berbagai jenis mata pencaharian, seperti: pembudidaya, pengolah hasil perikanan, nelayan, dan petani. Unit usaha KDKMP Pangkahwetan yang telah operasional yaitu gerai pemasaran dan pangkalan gas.
4) KDKMP Pangkahkulon masih belum beroperasional dan dalam tahap pembangunan fasilitas usaha dengan realisasi fisik sekitar 54%. Meskipun telah berkerja sama dengan Koperasi Rumput Laut, KDKMP Pangkahkulon masih belum bisa mengimplementasikan kerja sama tersebut.
5) Permasalahan umum kedua KDKMP tersebut antara lain: keterbatasan modal usaha, manajemen dan operasional KDKMP sangat terikat dengan Pengurus Desa, belum memiliki unit usaha yang dikelola secara profesional, pengurus belum memiliki pengalaman terkait bisnis KDKMP, masyarakat kurang berminat menjadi anggota karena KDKMP belum memiliki hasil kinerja/dampak ekonomi nyata bagi anggota, dan kurangnya komitmen dari Pemerintah Desa baik untuk operasionalisasi KDKMP maupun pengembangan usaha perikanan;
6) Terdapat tiga unit SPPG di Desa Pangkahwetan, dimana dua diantaranya telah beroperasional. SPPG aktif telah melayani MBG untuk siswa disekitar Desa Pangkahwetan dan Desa Pangkahkulon selama lebih dari 6 bulan terakhir, namun baru satu kali menggunakan ikan sebagai menu pada MBG, yakni otak-otak bandeng.

Gambar 15. Penyusunan Model Bisnis Hilirisasi Perikanan Kabupaten Gresik Mendukung Operasionalisasi KDKMP Pangkahkulon dan KDKMP Pangkahwetan

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha dan Investasi pada Triwulan I Tahun 2026

Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp. 000)	Realisasi Anggaran (Rp. 000)	Target Output		Realisasi Output		Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Persentase Realisasi Anggaran (%)
			TW I 2026	Tahun 2026	TW I 2026	S.d Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	
Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha dan Investasi (rekomendasi)	420.609	153.120	-	3					

Realisasi output Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha dan Investasi ditargetkan akan tercapai di triwulan II dan IV tahun 2026. Direktorat Pemberdayaan Usaha telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian realisasi output Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha dan Investasi sebesar Rp420.609.000,-. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp153.120.000,- atau setara dengan 36,40% terhadap total pagu anggaran.

9. Fasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Fasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran pada Triwulan I Tahun 2026

Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp. 000)	Realisasi Anggaran (Rp. 000)	Target Output		Realisasi Output		Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Persentase Realisasi Anggaran (%)
			TW I 2026	Tahun 2026	TW I 2026	S.d Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	
Pelaku Usaha yang difasilitasi Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran (Badan usaha)	147.694	37.926	4	30	4	4	100	13,3	25,67

Realisasi fasilitasi perizinan berusaha kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 4 badan usaha, yakni tercapai 100% jika dibandingkan dengan target Triwulan I tahun 2026 dan 13,3% dari target tahun 2026 sebesar 30 badan usaha. Adapun capaian tersebut terlaksana dalam bentuk fasilitasi perizinan berusaha pada 2 (dua) pelaku usaha pengolahan yaitu PT.

Mustika Mina Aurora dan PT Live Shell yang masih dalam tahapan perbaikan dokumen oleh pelaku usaha, dan 2 (dua) pelaku usaha pemasaran yaitu PT. Cendana Indo Pearls dan PT. Indo Mina Bahari yang telah terbit sertifikat standarnya. Kegiatan Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025, meliputi:

Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan.

Kegiatan verifikasi kelengkapan standar berusaha pengolahan dan pemasaran selama periode Triwulan I 2026, telah dilaksanakan 1 (satu) kali rapat verifikasi dan pembahasan dokumen persyaratan. Pertemuan ini bertujuan dalam rangka membahas kelengkapan komitmen, rencana usaha dan permohonan penerbitan standar usaha. Pertemuan dihadiri oleh tim verifikasi yang beranggotakan: Pusat Data, Statistik, dan Informasi - Setjen, Pusat Mutu Primer - BPMHKP, Pusat Pasca Panen - BPMHKP, Direktorat Konservasi dan Spesies Genetik - Ditjen Pengelolaan Kelautan, Bagian Hukum - Setditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan, Direktorat Logistik, Direktorat Pemasaran, BBP3KP, serta Koordinator Kelompok lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP pada tanggal 24 Februari 2026 di ruang rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha, serta melalui *video conference*. Adapun Selama periode Triwulan I telah diterbitkan 2 Sertifikat Standar Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan kepada 2 pelaku usaha (PT. Indo Mina Bahari dan PT. Cendana Indo Pearls) yang bermohon yang sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.

Gambar 16. Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 37.926.000,- atau setara dengan 25,67% dari total pagu efektif sebesar Rp. 147.694.000,-.

10. Fasilitasi Pelaku Usaha yang didampingi dalam rangka Realisasi Investasi

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Fasilitasi Pelaku Usaha yang didampingi dalam rangka Realisasi Investasi pada Triwulan I Tahun 2026

Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp. 000)	Realisasi Anggaran (Rp. 000)	Target Output		Realisasi Output		Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Persentase Realisasi Anggaran (%)
			TW I 2026	Tahun 2026	TW I 2026	S.d Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	
Pelaku Usaha yang didampingi dalam rangka Realisasi Investasi (Badan usaha)	132.512	34.347	0	15	0	0	0	0	25.91

Realisasi pendampingan investasi sektor kelautan dan perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilaksanakan. Adapun kegiatan persiapan dalam rangka pendampingan investasi sektor kelautan dan perikanan berupa rapat koordinasi dan penyiapan materi peluang investasi sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan pada 26 Januari 2026 di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha, Gedung Mina Bahari III, Lt. 12, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Usaha, dimana rapat ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Pengembangan Bisnis dan Valuasi Ekonomi Bidang Kelautan (Bapak Rino Febrian), perwakilan dari Direktorat Akses dan Promosi serta pegawai lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha. Hasil rapat ini sebagai berikut:

1. Rapat ini dilaksanakan dengan dilatarbelakangi adanya undangan keikutsertaan dalam sebuah Forum Investasi di Shenzhen, Guandong, China. Pertemuan tersebut terkonfirmasi akan dihadiri minimal lima perusahaan China yang bergerak di bidang tangkap, budidaya, pengolahan, dan finance. Bapak Rino Febrian selaku Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Pengembangan Bisnis dan Valuasi Ekonomi Bidang Kelautan akan mewakili KKP untuk hadir dalam fórum tersebut.

2. Pada fórum tersebut KKP diminta untuk menjelaskan kebijakan dan program Pemerintah Indonesia terbaru yang berhubungan dengan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dinilai sangat penting bagi pengusaha China karena sebagian besar industri perikanan mereka memperoleh bahan baku ikan dari Indonesia.

3. Misi delegasi Indonesia dalam fórum tersebut yaitu menawarkan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, terutama pada komoditas unggulan yaitu: rumput laut, tuna, udang, lobster, kepiting/rajungan, dan nila.

4. Direktorat Pemberdayaan Usaha sendiri telah menyusun dokumen peluang investasi, yaitu:
   a) Usaha Pengolahan Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi (2023)
   b) Industri Pengolahan Udang Terintegrasi di Kabupaten Kebumen (2023)
   c) Industri Pengolahan Ikan Terintegrasi di Kota Tual (2024)
   d) Industri Pengolahan Ikan Tuna Terintegrasi di Kabupaten Biak Numfor (2024)

5. Selain itu, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah berkerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM telah menyusun *Invesment Project Ready to Offer* (IPRO) sektor kelautan dan perikanan, antara lain:

   a) Perikanan Budidaya Komoditas Udang di Kabupaten Sumbawa Barat
   b) Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Takalar
   c) Budidaya Udang Terintegrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara
   d) Perikanan Tangkap Terintegrasi Dengan Pengolahannya di Kabupaten Maluku Tengah
   e) Pembangunan Pabrik Garam Industri di Kabupaten Jeneponto
   f) Budidaya Udang Vannamei di Kabupaten Bengkulu Utara

6. Pada tahun 2024, China adalah urutan nomor tiga negara sumber investasi di sektor kelautan dan perikanan setelah Australia dan Hongkong, dengan nilai mencapai Rp370,16 M. Adapun perkembangan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan dari China tahun 2021 hingga 2025 triwulan 3 : bidang usaha yang paling dominan adalah pengolahan, dengan daerah tujuan dominannya yaitu Papua Barat, Jawa Timur, dan Banten. Rincian perkembangan realisasi investasi

Gambar 17. Fasilitasi Pelaku Usaha yang didampingi dalam rangka Realisasi Investasi (Timja Perizinan)

3.2.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatnya UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas

IK2. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Omsetnya (Persen)

Potensi UMKM kelautan dan perikanan masih sangat terbuka luas untuk dikembangkan. Namun upaya pengembangan UMKM kerap dihadapkan pada berbagai permasalahan salah satunya adalah aspek finansial dalam hal ini peningkatan omset. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM kelautan dan perikanan diperlukan strategi pemberdayaan yang berpihak kepada UMKM dan menjadi solusi dalam berbagai permasalahan yang dihadapi dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan omsetnya.

Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Omsetnya dalam rangka mendorong tumbuhnya UMKM untuk meningkat omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan. Pada Tahun 2026 ditargetkan sebanyak 5,5% UMKM yang meningkat omsetnya dengan perhitungan sebagai berikut :

$\sum n\ \% = (\sum n1 / \sum n2) \times 100\%$

Σn %= Persentase peningkatan omset UMKM Pengolahan Produk KP

$\Sigma n1$ = Jumlah UMKM yang meningkat omsetnya

$\Sigma n2$ = Jumlah UMKM yang dibina

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	S.d Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026
Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Omsetnya (Persen)	0,5	-	5,5	5 UMKM			9,09		

Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Omsetnya merupakan persentase jumlah UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang meningkat omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan menuju UMKM Naik Kelas dibandingkan dengan Jumlah UMKM yang dibina. Target presentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas tahun 2026 naik 0.5% menjadi 5,5% dari 855 UMKM terkurasi atau sejumlah 48 UMKM. Pada triwulan I tahun 2026, target presentase adalah 0,5% dengan realisasi sebanyak 5 UMKM yang sudah naik kelas. Sementara, apabila dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 5.5%, maka realisasi TW I sebesar 9.09% dari target tahun 2026.

Usaha mikro, kecil dan menengah bidang pengolahan produk krelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya dihitung berdasarkan 6 aspek usaha (legalitas, sumber daya manusia, produksi, keuangan, pemasaran, operasional)

Indikator Kinerja Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya didukung oleh beberapa Rincian Output Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2026 sebagaimana berikut:

1. Fasilitasi Kemitraan Usaha KP

Fasilitasi Kemitraan ditujukan untuk mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi dengan membentuk jaringan kerjasama antara koperasi, UMKM dan usaha besar, usaha hulu dan usaha hilir dengan tujuan yang sama untuk

menjalankan suatu bisnis dan mencari keuntungan. Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026, meliputi:

a. **Inisiasi Peluang Kemitraan antara Koperasi Desa Merah Putih Tongke - Tongke dengan CV. Bhumiagri Nawasena Perkasa pada tanggal 10 Februari 2026**

(1) Kegiatan dilakukan secara hybrid yang bertujuan untuk penjajakan peluang kemitraan antara CV. Bhumiagri Nawasena Perkasa selaku pelaku usaha yang bergerak di bidang ekspor ikan tuna dengan Koperasi Desa Merah Putih Tongke - Tongke sebagai calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke.

(2) CV. Bhumiagri Nawasena Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang ekspor pada sektor perikanan dengan salah satu komoditasnya *Yellow Fin* Tuna, dengan tujuan ekspor negara Vietnam dan USA. Spesifikasi yang diminta yaitu:

- *Yellow Fin* Tuna grade ABC
- Kondisi segar atau beku, baik dibekukan di atas kapal atau dibekukan setelah mendarat
- Bentuk utuh yang telah dibuang kepala, insang, dan isi perutnya
- Size di atas 20 kilogram

(3) Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tongke-Tongke berada di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan memiliki potensi ikan tuna yang cukup besar, dengan profile sebagai berikut:

- Memiliki populasi 500-600 nelayan dengan kepemilikan kapal 300-400 kapal dengan ukuran 28–38 GT
- Rata-rata dalam sekali tangkapan mendapatkan 2-3 ton ikan tuna dalam 1 kapal
- Prasarana sarana yang tersedia antara lain gudang beku kapasitas 20 ton, ABF kapasitas 5 ton, genset 2 unit, sumber air bersih berasal dari PDAM dan kendaraan berefrigerasi
- Rata-rata harga ikan tuna Rp. 60.000 - Rp 80.000/kg tergantung grade ikan
- Penanganan ikan terdiri dari pembersihan ikan hingga isi perut yang dikeluarkan dilakukan di atas kapal, dengan pendinginan di atas laut

menggunakan es balok, dan didaratkan dengan kondisi segar/dingin, dan dapat dibekukan setelah didaratkan

- Musim tangkapan ikan tuna ialah Bulan Oktober hingga Februari
- Seluruh legalitas dari KNMP Tongke-Tongke sudah lengkap

(4) Diharapkan kelompok nelayan dapat menerapkan sistem rantai dingin dan penanganan hasil tangkapan untuk mendapatkan kualitas ikan tuna yang prima, sesuai dengan standar yang ditetapkan

(5) Berikutnya CV. Bhumiagri Nawasena Perkasa dapat berkoordinasi dengan Koperasi Desa Merah Putih Tongke - Tongke untuk dapat membahas lebih detail terkait kesepakatan spesifikasi, harga dan lainnya

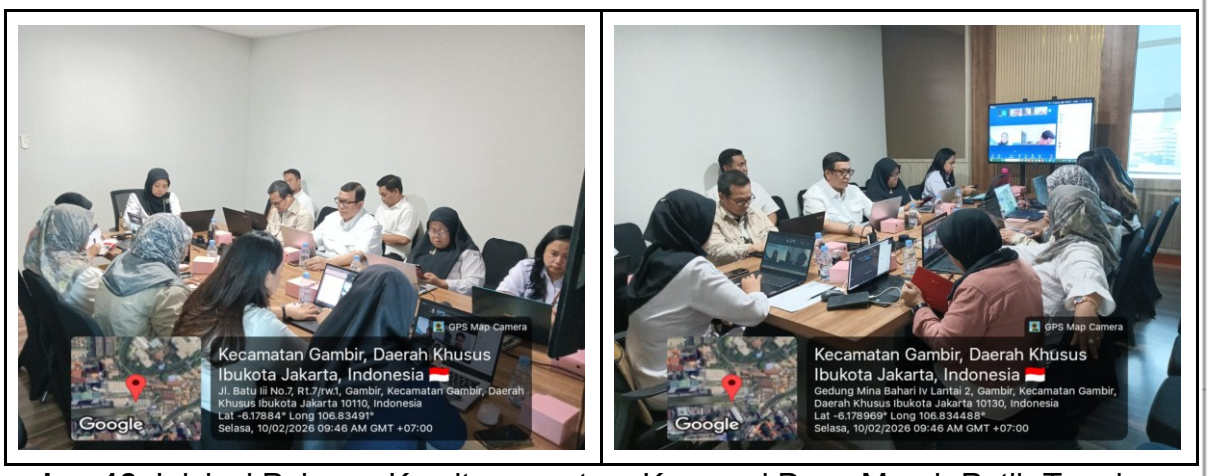

Gambar 18. Inisiasi Peluang Kemitraan antara Koperasi Desa Merah Putih Tongke - Tongke dengan CV. Bhumiagri Nawasena Perkasa pada tanggal 10 Februari 2026

b. Inisiasi Peluang Kemitraan antara Koperasi Desa Merah Putih Cikiruhwetan Kecamatan Cikeusik dengan Koperasi Produsen Mina Muara Sejahtera pada tanggal 11 Februari 2026

(1) Kegiatan dilakukan secara luring yang bertujuan untuk penjajakan peluang kemitraan antara Koperasi Desa Merah Putih Cikiruhwetan Kecamatan Cikeusik sebagai calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Cikiruhwetan dengan Koperasi Produsen Mina Muara Sejahtera

(2) Profile Koperasi Desa Merah Putih Cikiruhwetan sebagai berikut:

Secara umum, KDMP Cikiruhwetan belum menjalankan kelembagaan dan tata kelola koperasi. Dari hasil identifikasi, KDMP baru memiliki struktur organisasi baru terdiri atas pengurus dan pengawas.

KDMP Cikiruhwetan akan menyasar ke sekitar 100 orang yang akan menjadi anggota dan belum melaksanakan kewajiban sebagai anggota yaitu

pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Diantara 100 calon anggota, 70 diantaranya berprofesi sebagai nelayan.

Dalam pengoperasionalan gudang beku, pengurus telah menginstal aplikasi untuk memantau operasional gudang (digitalisasi).

(3) Desa Binuangeun, Kabupaten Lebak merupakan sentra perikanan terbesar di Provinsi Banten. Desa Cikiruhwetan-Kabupaten Pandeglang berbatasan langsung dengan Desa Binuangeun-Kabupaten Lebak, dipisahkan oleh muara sungai, namun hasil tangkapan ikan lebih banyak didaratkan dan dilelang di Desa Binuangeun. Hal ini disebabkan di Desa Binuangeun terdapat fasilitas Tempat Pendaratan Ikan dan SPBUN untuk para nelayan

(4) Unit usaha sektor KP yang terdapat di KNMP Cikiruhwetan, antara lain:

- Gudang beku kapasitas 10 ton yang dilengkapi dengan ABF kapasitas 1 ton dan peralatan pendukung
- Pabrik es balok kapasitas 10 ton yang dilengkapi dengan gudang es kapasitas 2 ton dan peralatan pendukungnya;
- Truk refrigerasi roda 6;
- 50 unit Cool Box;
- Kios Pemasaran Ikan; dan
- Sentra kuliner

(5) Profile Koperasi Produsen Mina Muara Sejahtera (MMS) sebagai berikut:

- Koperasi Produsen Mina Muara Sejahtera (MMS) pernah mendapat bantuan juga berupa Gudang beku kapasitas 10 ton yang dilengkapi dengan ABF kapasitas 1 ton dan peralatan pendukung. Selain itu, Koperasi MMS juga memiliki gudang beku kapasitas 120 ton, 2 kapal 30 GT dan unit penanganan ikan beku. Koperasi MMS memiliki 500 anggota yang berasa dari 53 Kelompok Usaha Bersama (KUB).
- Dalam pemanfaatan gudang beku, Koperasi MMS menerapkan model bisnis penggunaan untuk sendiri dan penyewaan beku dengan biaya sebesar Rp. 50 per kg per hari. Sehingga untuk memenuhi utilitas gudang beku, Koperasi MMS mencari bahan baku sampai ke Muara Baru dan Cilacap.

- Secara umum, Koperasi MMS sudah memiliki pasar untuk ikan beku, namun kesulitan untuk mencari bahan baku. Sebagai gambaran pada tahun 2025, utilitas gudang beku milik Koperasi MMS maksimal di 70%.
- Koperasi MMS telah memiliki SKP pada unit penanganan ikan beku dan proses pengajuan HACCP.

(6) Pola kemitraan yang dapat diterapkan antara Koperasi MMS dengan KDMP Cikiruhwetan dalam pemanfaatan KNMP antara lain:

- Menyewa gudang beku, pabrik es balok dan kendaraan refrigerasi secara satu kesatuan;
- Menyewa keseluruhan gudang beku;
- Melakukan penyertaan modal dengan sistem bagi hasil dalam pengelolaan gudang beku dan pabrik es;
- KDMP Cikiruhwetan mengelola gudang beku secara mandiri, dengan mengambil ikan dari Koperasi MMS yang kemudian disalurkan ke SPPG mitra Koperasi MMS; atau
- Koperasi MMS akan menyewa atau menitipkan beku kepada KDMP Cikiruhwetan bila kekurangan kapasitas gudang beku

(7) Ketua Koperasi MMS dan KDMP Cikiruhwetan akan berdiskusi lebih lanjut terkait kemitraan pemanfaatan KNMP

Gambar 19. Inisiasi Peluang Kemitraan antara Koperasi Desa Merah Putih Cikiruhwetan Kecamatan Cikeusik dengan Koperasi Produsen Mina Muara Sejahtera pada tanggal 11 Februari 2026

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Kemitraan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan (Kesepakatan) pada Triwulan I Tahun 2026

Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp. 000)	Realisasi Anggaran (Rp. 000)	Target Output		Realisasi Output		Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Persentase Realisasi Anggaran (%)
			TW I 2026	Tahun 2026	TW I 2026	S.d Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	
Kemitraan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan (Kesepakatan)	121.641	1.605	0	10	-	-	-	-	1,32%

Target Kemitraan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan pada tahun 2026 sebanyak 10 kesepakatan, dan belum ada target kesepakatan pada triwulan I tahun 2026. Tidak ada kendala dalam pencapaian target, dikarenakan dalam Triwulan I merupakan periode persiapan dan identifikasi kebutuhan fasilitasi kemitraan. Pada periode berikutnya akan dilakukan beberapa opsi dalam kegiatan fasilitasi kemitraan, yaitu:

a. Fasilitasi kemitraan antara perikanan sektor hulu (tangkap dan budidaya) untuk bermitra dengan usaha hilir (pengolahan dan pemasaran hasil perikanan);
b. Fasilitasi kemitraan antara usaha mikro kecil dan koperasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan dengan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
c. Fasilitasi kemitraan antara UMKM hasil kelautan dan perikanan dengan BUMN; atau
d. Fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk bermitra dengan distributor dan jaringan pemasaran digital.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 1.605.000,- atau setara dengan 1,32% dari total pagu sebesar Rp. 121.641.000,-.

2. Peningkatan Kapasitas Lembaga usaha KP

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Usaha Kelautan dan Perikanan merupakan langkah untuk membangun ekosistem usaha dalam mendorong pengembangan dan keberlanjutan usaha yang berdaya saing. Upaya yang dilakukan

yaitu dengan memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaku usaha agar mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya dan meningkatkan posisi tawar sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan pelaku usaha. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Usaha Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026, meliputi:

(a) Monitoring dan Evaluasi Operasional Koperasi Desa Merah Putih Mekarmukti Cihampelas pada tanggal 8 Januari 2026

(1) Koperasi Desa Merah Putih Mekarmukti memiliki jumlah anggota sebanyak 200 orang. Skema permodalan internal koperasi didukung melalui simpanan wajib anggota sebesar Rp60.000 per orang. Selain itu, koperasi telah menarik minat sejumlah investor eksternal. Namun demikian, realisasi kerja sama investasi belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan dan kendala ketersediaan lahan yang dapat diusulkan secara resmi, termasuk belum tersedianya lahan usulan melalui skema Agrinas.

(2) Dalam pelaksanaan usaha budidaya, koperasi memanfaatkan lahan dengan status sewa selama lima tahun dengan nilai sewa sebesar Rp. 50.000.000. Pada lokasi tersebut telah dibangun sebanyak 24 kolam bioflok yang direncanakan untuk kegiatan pembesaran ikan nila. Pekerja pada unit bioflok berasal dari anggota koperasi sendiri, sehingga kegiatan usaha ini sekaligus menjadi sarana pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja internal koperasi.

(3) Sumber air yang digunakan untuk kegiatan budidaya berasal dari sumur bor. Berdasarkan hasil pengamatan, air sumur bor tersebut mengandung zat besi sehingga memerlukan proses filtrasi sebelum digunakan dalam kolam bioflok. Kebutuhan sarana penyaringan air menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan guna menjaga kualitas air, kesehatan ikan, serta keberlanjutan produksi.

(4) Terkait kesiapan input produksi, pakan ikan telah tersedia dan sudah berada di lokasi usaha dan direncanakan akan dilakukan penebaran pada minggu berikutnya. Selain itu, koperasi belum memiliki pemasok pakan tetap. Meskipun terdapat banyak calon pemasok yang berpotensi, belum ada kerja sama yang dilakukan sehingga diperlukan penguatan aspek kemitraan untuk menjamin kesinambungan pasokan pakan.

(5) Koperasi juga memiliki rencana pengembangan usaha lanjutan untuk mengantisipasi potensi kelebihan pasokan ikan nila di pasar. Salah satu strategi yang direncanakan adalah pengembangan produk olahan berupa kerupuk ikan nila. Rencana ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk, memperluas segmen pasar, serta menjaga stabilitas pendapatan koperasi dan anggotanya. Untuk merealisasikan rencana tersebut, koperasi membutuhkan dukungan peralatan pengolahan yang memadai.

(6) Dalam aspek pengelolaan keuangan usaha, koperasi menetapkan skema pembagian hasil sebesar 20% dari keuntungan usaha dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai pendapatan kelembagaan, sedangkan 80% digunakan untuk mendukung operasional usaha.

(7) Selain unit usaha budidaya pembesaran, koperasi memiliki rencana pengembangan kolam benih ikan nila sebagai upaya memperkuat keberlanjutan produksi ikan nila, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemasok benih dari luar serta meningkatkan efisiensi biaya produksi.

Gambar 20. Monitoring dan Evaluasi Operasional Koperasi Desa Merah Putih Mekarmukti Cihampelas pada tanggal 8 Januari 2026

(b) Monitoring dan Evaluasi Operasional Koperasi Desa Merah Putih Mekarsari Kecamatan Cipongkor pada tanggal 9 Januari 2026

(1) Koperasi Desa Merah Putih Mekarsari memiliki jumlah anggota sebanyak 71 orang. Anggota koperasi berasal dari latar belakang yang beragam, sehingga dari sisi manajerial masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Koperasi telah mengikuti kegiatan pelatihan di Banyuwangi terkiat budidaya bioflok, namun pelatihan tersebut belum menjangkau seluruh anggota, sehingga ke depan masih dibutuhkan pelatihan lanjutan yang lebih merata dan terstruktur.

(2) Dari sisi perencanaan usaha, koperasi dihadapkan pada tantangan kompetisi dengan pelaku usaha besar, khususnya platform marketplace yang telah memiliki skala dan jaringan pasar yang luas.

(3) Dalam aspek permodalan, koperasi masih menghadapi kendala pembiayaan usaha. Koperasi saat ini telah memanfaatkan skema pendanaan dari investor, yang digunakan untuk mendukung pembangunan sarana pendukung usaha, yaitu gudang pakan.

(4) Terkait rencana usaha perikanan, koperasi tengah mempersiapkan proses budidaya tematik ikan lele. Hingga saat ini, hampir seluruh kolam telah terisi air, sementara proses pembentukan bioflok baru akan dilakukan setelah seluruh kebutuhan obat-obatan dan sarana pendukung diterima dari penyedia. Penebaran benih direncanakan dilakukan dalam waktu 7–10 hari ke depan. Sarana pendukung lain seperti gudang masih dalam tahap proses, sedangkan ketersediaan air dan listrik telah terpenuhi.

(5) Koperasi menargetkan tingkat keberhasilan budidaya sebesar 80%. Pemilihan komoditas lele didasarkan pada pertimbangan kebutuhan pembiayaan yang relatif lebih rendah. Target pasar utama diarahkan pada SPPG, dengan minat kerja sama dari sekitar 20 dapur MBG. Salah satu anggota koperasi, yaitu sekretaris, merupakan chef pada dapur MBG, sehingga dapat menjadi modal sosial dalam pengembangan jejaring pasar.

(6) Terkait pengembangan unit bisnis wajib koperasi, setelah seluruh gerai selesai dibangun, koperasi merencanakan pembukaan unit usaha tersebut serta menjajaki kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bulog dan pihak terkait lainnya. Rencana kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat akses pasar, meningkatkan kredibilitas usaha koperasi, serta mendukung keberlanjutan unit bisnis koperasi ke depan

Gambar 21. Monitoring dan Evaluasi Operasional Koperasi Desa Merah Putih Mekarsari Kecamatan Cipongkor pada tanggal 9 Januari 2026

(c) Bimbingan Teknis Tata Kelola Usaha Rantai Dingin yang Efesien dan Berkelanjutan pada tanggal 4 Februari 2026

(1) Tujuan dilaksanakannya kegiatan yaitu meningkatkan pengetahuan tata kelola unit usaha rantai dingin (*cold storage*, pabrik es dan kendaraan berpendingin) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pengelola KNMP dan optimalisasi operasional unit usaha rantai dingin di lokasi KNMP

(2) Target peserta berjumlah 200 (dua orang) yang terdiri atas:

- Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP);
- Dinas yang menangani Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yang terdapat di lokasi KNMP;
- Penyuluh Perikanan Pendamping KNMP;
- Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, DJPT;
- Direktorat Prasarana dan Sarana, DJPB;
- Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, BPSDMKP; dan
- Eselon 2 Lingkup Ditjen PDSPKP

(3) Narasumber yang akan dihadirkan yaitu:

- Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, DJPT yang memberikan sambutan Pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih;
- ASHRAE dengan materi yang disampaikan Pengelolaan Usaha Ice Slurry;
- Koperasi Produsen Kampung Nelayan Maju Desa Suak Gual dengan materi yang disampaikan Pengelolaan Usaha Pabrik Es Balok;
- Koperasi Produsen Mina Muara Sejahtera dengan materi yang disampaikan Pengelolaan Usaha Gudang Beku Portable; dan
- Koperasi Serba Usaha Rukun Mina Barokah dengan materi yang disampaikan Pengelolaan Usaha Kendaraan Berpendingin.

(4) Secara garis besar point-point yang disampaikan antara lain:

- Pengertian *ice slurry* dan perbedaannya dengan es balok/es serpih, fungsi *ice slurry* dalam rantai dingin perikanan dan keunggulan *ice slurry*

- Proses produksi pabrik *ice slurry*, pabrikes balok, gudang beku dan kendaraan berpendingin
- Aspek biaya dan keuangan usaha pabrik *ice slurry*, pabrik es balok, gudang beku dan kendaraan berpendingin
- Kunci keberhasilan mengelola pabrik *ice slurry*, pabrik es balok, gudang beku dan kendaraan berpendingin
- Hambatan/kendala dalam bisnis pabrik *ice slurry*, pabrik es balok, gudang beku dan kendaraan berpendingin
- Model pengelolaan pabrik *ice slurry*, pabrik es balok, gudang beku dan kendaraan berpendingin

Gambar 22. Bimbingan Teknis Tata Kelola Usaha Rantai Dingin yang Efesien dan Berkelanjutan pada tanggal 4 Februari 2026

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Peningkatan kapasitas Lembaga usaha KP pada Triwulan I Tahun 2026

Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp. 000)	Realisasi Anggaran (Rp. 000)	Target Output		Realisasi Output		Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Persentase Realisasi Anggaran (%)
			TW I 2026	Tahun 2026	TW I 2026	S.d Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	
Lembaga Usaha Kelautan Perikanan yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaan Usaha (Lembaga)	1.333.252	161.259	2	120	2	2	100%	1,66%	12%

Target Lembaga usaha yang ditingkatkan dan dibina kapasitas kelembagaannya pada tahun 2026 sebanyak 120 lembaga, sedangkan target pada triwulan I tahun 2026 adalah sebanyak 2 lembaga. Realisasi capaian jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya pada triwulan I tahun 2024 adalah 2 lembaga usaha, hal ini sesuai target dan telah mencapai 100%, jika dibandingkan dengan target tahun 2026 maka realisasi lembaga usaha hasil KP yang telah ditingkatkan sebesar 1,66%.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 161.259.246,- atau setara dengan 12,09% dari total pagu sebesar Rp. 1.333.252.000,-.

3. Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina (Timja Kewirausahaan dan Timja Kurasi

a. *Business Matching* UMKM Hasil Kelautan dan Perikanan dengan *Retail Modern*

Kegiatan Business Matching UMKM Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Retail Modern telah dilaksanakan pada 12 Februari 2026 di Ruang Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, dengan tujuan memperluas akses pasar UMKM sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan daya saing produk melalui kemitraan dengan retail modern. Kegiatan ini diikuti oleh 50 UMKM terpilih, terdiri atas 30 peserta luring dan 20 peserta daring, serta mempertemukan UMKM dengan 5 buyer retail modern, yaitu PT Marco Sekawan, HIPPINDO, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Indomarco Prismatama, dan PT Cakra Berkah Rejekindo. Rangkaian kegiatan meliputi penyampaian teknis acara, pelaksanaan one-on-one business matching, pemaparan strategi akses pasar retail modern oleh perwakilan HIPPINDO, serta penandatanganan Letter of Intent (LOI). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 27 UMKM berhasil menandatangani LOI dengan estimasi total nilai kerja sama sebesar Rp5.945.230.720 untuk jangka waktu 6 bulan. Sebagai tindak lanjut, fasilitasi pitching dengan pihak AEON akan dilaksanakan di luar rangkaian kegiatan melalui koordinasi bersama ASPPENDO, disertai proses kurasi produk untuk memastikan kesesuaian dengan standar retail modern.

Gambar 23. Business Matching UMKM Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Retail Modern

b. Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Permodalan

1. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang, Kalimantan Barat

   Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Permodalan yang dilaksanakan pada 2 Maret 2026 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, bertujuan untuk mendorong penumbuhan dan keberlanjutan usaha sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas wirausaha serta kemudahan akses pembiayaan. Kegiatan ini dihadiri oleh 75 peserta yang terdiri dari nelayan dan pelaku UMKM perikanan, serta melibatkan DPR RI, KKP, pemerintah daerah, dan perbankan. Dalam pelaksanaannya, disampaikan potensi besar sektor perikanan di Singkawang, pentingnya kewirausahaan yang inovatif dan berdaya saing, serta dukungan pemerintah melalui berbagai program bantuan dan skema pembiayaan seperti KUR. Peserta juga mendapatkan pemahaman terkait prosedur pengajuan kredit dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Kegiatan ini menekankan perlunya penguatan SDM, pendampingan usaha, serta pengelompokan pembiayaan berbasis klaster untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga diharapkan mampu memperkuat pengembangan UMKM kelautan dan perikanan di daerah.

Gambar 24. Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Permodalan

2. Bimbingan Teknis di Kab. Aceh Timur, Aceh

   Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Permodalan yang dilaksanakan pada 4 Maret 2026 di Kota Langsa, Aceh Timur, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akses permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota DPR RI, pemerintah daerah, perbankan, serta diikuti oleh sekitar 75 peserta yang terdiri dari calon wirausaha dan pelaku usaha pemula. Dalam pelaksanaannya, disampaikan potensi besar subsektor pengolahan perikanan di Kota Langsa, pentingnya peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dukungan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Materi yang diberikan meliputi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan tata cara pengajuan permodalan. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pengembangan usaha, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat keberlanjutan UMKM sektor kelautan dan perikanan di wilayah tersebut.

Gambar 25. Bimbingan Teknis di Kab. Aceh Timur, Aceh

3. Bimbingan Teknis di Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat

   Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Permodalan yang dilaksanakan pada 6 Maret 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, bertujuan untuk mendorong penumbuhan dan keberlanjutan usaha sektor kelautan

dan perikanan melalui peningkatan kapasitas wirausaha serta akses pembiayaan. Kegiatan ini dihadiri oleh 75 peserta yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan, serta melibatkan pemangku kepentingan dari DPR RI, KKP, pemerintah daerah, dan perbankan. Dalam pelaksanaannya, disampaikan potensi besar sektor perikanan, pentingnya kewirausahaan yang inovatif dan berdaya saing, serta dukungan pemerintah melalui berbagai skema pembiayaan seperti KUR dan dana bergulir. Peserta juga mendapatkan pemahaman terkait prosedur pengajuan pembiayaan dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Kegiatan ini mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan modal, sarana prasarana, kualitas SDM, dan pemasaran produk, sehingga direkomendasikan adanya penguatan pelatihan, pendampingan, pengelompokan usaha berbasis klaster, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing UMKM kelautan dan perikanan.

Gambar 26. Bimbingan Teknis di Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat

4. Bimbingan Teknis di Kab. Lampung Tengah, Lampung

   Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kewirausahaan dan Akses Permodalan telah dilaksanakan di Desa Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan tujuan meningkatkan kapasitas kewirausahaan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan serta memperkuat akses terhadap legalitas dan pembiayaan usaha. Kegiatan ini diikuti oleh 75 peserta yang terdiri atas calon wirausaha pengolahan hasil perikanan dan pelaku usaha perikanan, serta dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR RI, perwakilan Direktorat Pemberdayaan Usaha, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah, dan pelaku UMKM perikanan setempat. Materi yang disampaikan meliputi penguatan kewirausahaan, fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, pengendalian mutu, strategi pemasaran, dan pengembangan usaha berkelanjutan. Melalui

kegiatan ini, diharapkan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kapasitas usaha yang lebih baik, akses permodalan yang lebih luas, serta kemampuan menghasilkan produk yang lebih kompetitif dan bernilai tambah.

Gambar 27. Bimbingan Teknis di Kab. Lampung Tengah, Lampung

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina pada Triwulan I Tahun 2026

Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp. 000)	Realisasi Anggaran (Rp. 000)	Target Output		Realisasi Output		Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Persentase Realisasi Anggaran (%)
			TW I 2026	Tahun 2026	TW I 2026	S.d Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	
Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina (UMKM)	**3.609.405**	**631.755**	**225**	**3.650**	340	340	150	9,31	17,50
- Penumbuhan dan Pembinaan Wirausaha KP	420.085	204.811	20	400	30	30	150	7,50	48,75
- Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Permodalan	2.962.900	375.375	200	3000	300	300	150	10,00	12,66
- Kurasi Usaha Kelautan Perikanan	226.420	51.568	5	250	10	10	200	4,00	22,77

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi capaian kegiatan wirausaha kelautan dan perikanan menunjukkan progres yang cukup baik namun masih perlu percepatan untuk mencapai target tahunan. Dari sisi output, kegiatan penumbuhan dan pembinaan wirausaha KP telah mencapai 30 dari target triwulan sebesar 20 (150%) dan 7,5%

terhadap target tahunan sebesar 400. Kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses permodalan juga telah mencapai 300 UMKM dari target triwulan sebesar 200 (150%) atau 10% dari target tahunan sebesar 3.000.

5. Pelaksanaan Kurasi Usaha di Kabupaten Bandung

Pelaksanaan kurasi usaha di kabupaten Bandung dilaksanakan di desa cukang genteng dengan sebagian besar responden adalah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro dengan produk utama ikan pindang. Usaha terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, dan dikelola secara perorangan oleh rumah tangga, dengan tenaga kerja 1-5 orang.

1. Legalitas: Tingkat kepemilikan legalitas usaha masih rendah. Banyak pelaku usaha belum memiliki NIB, PIRT, Merek, atau Sertifikat Halal.
2. Keuangan: Praktik pencatatan keuangan sangat minim. Sebagian besar belum memiliki laporan keuangan dan menilai untung/rugi secara sederhana ("cukup untuk jualan lagi"). Akses terhadap kredit program sudah mulai dimanfaatkan, namun literasi keuangan masih perlu ditingkatkan.
3. Produksi & Operasional: Proses produksi masih sangat manual dan menyatu dengan dapur rumah tangga. Penerapan SOP, GMP, dan pengujian mutu produk masih sangat jarang. Kontinuitas produksi relatif stabil, namun skala produksi terbatas.
4. Pemasaran: Pemasaran bersifat tradisional (dijual sendiri, keliling kampung) dengan target pasar lokal. Pemanfaatan strategi promosi digital sangat minim, dan sebagian besar tidak memiliki merek dagang.
5. SDM: Tenaga kerja umumnya adalah anggota keluarga dengan kompetensi yang diperoleh secara turun-temurun. Pelatihan formal dan evaluasi kinerja jarang dilakukan.

Kesimpulan: UMKM binaan berada pada tahap awal pengembangan (start-up atau subsistence). Potensi untuk naik kelas sangat besar, namun terkendala oleh keterbatasan kapasitas di seluruh aspek manajemen usaha. Intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan sangat diperlukan.

Secara umum, pengembangan UMKM perlu dilakukan melalui pendampingan terpadu dan berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek usaha, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dasar menuju usaha yang lebih profesional dan berdaya saing.

1. Legalitas Usaha

   Perlu dilakukan pendampingan kolektif dan intensif untuk pengurusan NIB, PIRT, sertifikat halal, dan merek, disertai sosialisasi manfaat legalitas guna mendorong akses pasar dan permodalan.

2. Produksi & Mutu

   Diperlukan peningkatan standar produksi melalui pelatihan GMP/SSOP, fasilitasi uji mutu produk, serta penataan ruang produksi yang lebih higienis. Selain itu, perlu dorongan diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai tambah.

3. Keuangan

   Perlu penguatan literasi dan tata kelola keuangan, melalui pelatihan pembukuan sederhana, pemisahan keuangan usaha-pribadi, serta peningkatan kapasitas akses pembiayaan berbasis data keuangan.

4. SDM

   Dibutuhkan program pelatihan berkelanjutan (teknis dan manajerial), termasuk studi banding dan edukasi keamanan pangan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

5. Pemasaran

   Perlu pengembangan strategi pemasaran modern, melalui pelatihan digital marketing, penguatan branding dan kemasan, serta fasilitasi akses ke pasar yang lebih luas (ritel, horeca, pameran).

6. Operasional & Pengembangan Usaha

   Diperlukan pendampingan dalam manajemen risiko, kemitraan usaha, dan penyusunan rencana bisnis, agar usaha lebih terencana, устойчив (berkelanjutan), dan siap berkembang.

Sementara itu, kurasi usaha kelautan dan perikanan telah terealisasi sebanyak 10 UMKM terkurasi jika dibandingkan dengan target triwulan I maka persentase capaiannya sebesar 200%, atau 9,09 % dari target tahunan sebesar 110. Dari sisi anggaran, realisasi mencapai Rp 52.783.510 ribu dari total alokasi Rp 226.420.000

ribu atau sekitar 23,31%, yang menunjukkan penyerapan anggaran masih perlu dioptimalkan pada triwulan berikutnya.

Meskipun capaian triwulan telah memenuhi target, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha, belum optimalnya kualitas SDM dan kapasitas usaha, serta masih terbatasnya pemasaran dan nilai tambah produk. Selain itu, pelaksanaan kurasi usaha masih relatif rendah dibandingkan target tahunan. Oleh karena itu, diperlukan langkah tindak lanjut berupa peningkatan intensitas pendampingan dan pelatihan, penguatan akses pembiayaan melalui skema yang lebih mudah dan inklusif, percepatan pelaksanaan kurasi usaha, serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait. Upaya ini diharapkan dapat mendorong percepatan capaian output dan optimalisasi penyerapan anggaran pada triwulan selanjutnya.

4. Fasilitasi Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Kredit Program (Timja Pembiayaan)

1. Peningkatan Komptensi Pemberdayaan Usaha

Kegiatan Peningkatan Komptensi Pemberdayaan Usaha telah dilaksanakan sebanyak 2 sesi yaitu sesi pembelajaran yang dilaksanakan tanggal 7 Januari 2026 di Ruang Rapat Arwana I Gedung Mina Bahari II Lantai 14, KKP dan sesi penilaian kompetensi yang dilaksanakan tanggal 9 Januari 2026 di Hotel El-Royal Bandung. Kegiatan masing-masing dihadiri 40 orang yang terdiri dari perwakilan BPPSDMKP, BPPMHKP, sejumlah pegawai dari Direktorat Pemberdayaan Usaha serta tim penilai kompetensi. Kegiatan merupakan upaya peningkatan kompetensi ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha agar memiliki kemampuan berstandar BNSP. Materi yang dipelajari terdiri dari 10 pokok bahasan terdiri dari :

- Melakukan studi tentang proses produksi suatu produk;
- Menghitung biaya investasi;
- Mengelola izin usaha industri;
- Melakukan survei terhadap pedagang ritel suatu produk;
- Memasarkan suatu produk;
- Melakukan pembukuan keuangan untuk setiap transaksi;
- Mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan;
- Mempraktikkan komunikasi yang efektif;

- Mengembangkan kematangan emosional dan motivasi kerja;
- Mengoperasikan peralatan computer

Uji kompetensi meliputi ujian tertulis dan observasi yang dilakukan oleh asessor yang memiliki kualifikasi sebagai asessor BNSP.

Sebagai tindak lanjut, pegawai yang telah lulus uji kompetensi dan mendapatkan sertifikasi dari BNSP akan mendapatkan tugas untuk mendampingi UMKM dalam pengembangan usahanya.

Gambar 28. Peningkatan Komptensi Pemberdayaan Usaha

2. Temu Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Bandung

Kegatan Temu Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Bandung telah dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026 di Aula Desa Cukanggenteng, Kabupaten Bandung. Kegiatan dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, perwakilan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Jawa Barat, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung dan sebagai peserta adalah 84 pelaku usaha pemindang ikan di Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasirjambu. Hasil capaian kegiatan antara lain :

- Sebanyak 84 pelaku usaha pemindang ikan telah memperoleh pemahaman mengenai literasi keuangan dan perlindungan konsumen, sehingga diharapkan mampu mengelola usaha secara lebih tertib dan aman.
- Dari jumlah tersebut, 44 pelaku usaha telah resmi menjadi nasabah program PNM Mekaar, sementara 40 pelaku usaha lainnya menyatakan minat untuk bergabung.
- Melalui proses kurasi, telah teridentifikasi sejumlah pelaku usaha yang dinilai siap untuk difasilitasi akses pembiayaan. Selain itu, kegiatan ini juga

digunakan untuk membangun komitmen awal sinergi antara KKP, Pemerintah Daerah, dan PNM dalam pengembangan ekosistem pembiayaan berbasis komunal yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan

Gambar 29. Temu Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Bandung

3. ***Training of Trainers* (ToT) dalam rangka Uji Coba Modul Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan**

Kegiatan *Training of Trainers* (ToT) dalam rangka Uji Coba Modul Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan pada tanggal 9 - 11 Maret 2026 di Common Room Gedung MIna Bahari III Lantai 6, KKP. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Usaha, tim penyusun modul, perwakilan Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPSDM KP, serta fasilitator materi untuk melakukan simulasi penyampaian seluruh modul pembelajaran. Berdasarkan hasil uji coba dan diskusi selama kegiatan ToT, diperoleh beberapa masukan antara lain perlunya penyederhanaan metode penyampaian materi penyusunan laporan keuangan agar lebih sesuai dengan tingkat literasi keuangan pelaku usaha mikro, serta penambahan simulasi perencanaan keuangan pada kondisi tidak ideal *(contingency plan)* dan penguatan materi terkait perencanaan tabungan usaha berbasis target.

Sebagai tindak lanjut, tim penyusun akan melakukan penyempurnaan materi modul berdasarkan hasil uji coba. Modul yang telah disempurnakan selanjutnya akan dimanfaatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan pada wilayah prioritas, termasuk mendukung pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dan Kampung Budidaya Tematik, serta menjadi bahan pembelajaran dalam pengembangan *corporate university* (corpu) di lingkungan Ditjen PDSPKP khususnya Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Gambar 30. Training of Trainers (ToT) dalam rangka Uji Coba Modul Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan

4. **Webinar Nasional "Dari Literasi Keuangan ke Pasar Digital: Strategi Usaha Perikanan Naik Kelas" Kerja Sama dengan Shopee**

Kegiatan Webinar Nasional "Dari Literasi Keuangan ke Pasar Digital: Strategi Usaha Perikanan Naik Kelas" Kerja Sama dengan Shopee telah dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026 secara hybrid melalui platform Zoom Meeting dan di Ruang Rapat Sekretariat Ditjen PDSPKP Gedung Mina Bahari III Lantai 14, KKP. Kegiatan diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan *platform e-commerce* Shopee (PT. Shopee International Indonesia, PT Bank SeaBank Indonesia, dan PT AirPay International Indonesia). Kegiatan dihadiri oleh 902 peserta terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain pegawai KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaku usaha UMKM sektor kelautan dan perikanan, pengelola Kampung Nelayan Merah Putih dan kampung budidaya tematik, penyuluh perikanan, peserta vokasi KKP, serta perwakilan mitra *platform* digital. Kegiatan webinar ini diikuti oleh 13 Koperasi Desa KDMP pengelola KNMP dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Garut, Bandung Barat, Bone, Lampung Selatan, Sumbawa, Kudus, Kebumen, Purworejo, Takalar, dan Sijunjung guna mendukung operasionalisasi program prioritas KKP, khususnya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan program budi daya tematik, melalui penguatan ekosistem usaha dan akses pasar di tingkat sentra produksi. Sebagai tindak lanjut kegiatan, direncanakan beberapa langkah lanjutan sebagai berikut:

1) Penjajakan peluang pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan lanjutan secara luring bagi pelaku usaha di kampung nelayan dan kampung

budidaya prioritas guna memperkuat implementasi literasi keuangan, pencatatan usaha, serta pemasaran digital secara lebih aplikatif di lapangan

2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan bersama dengan Shopee

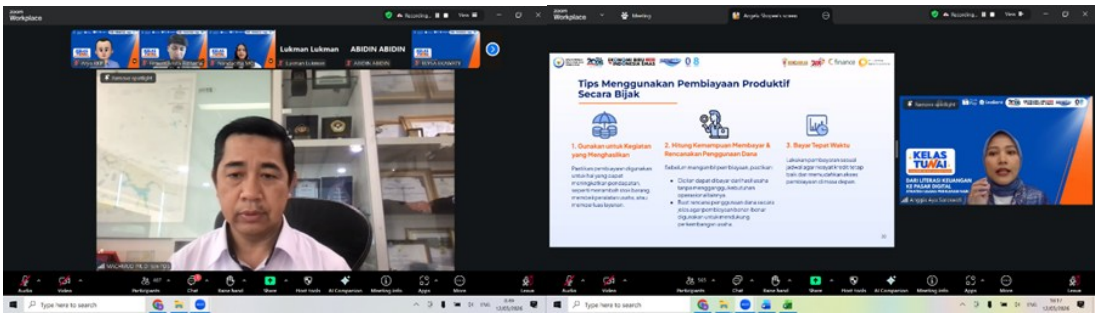

Gambar 31. Webinar Nasional "Dari Literasi Keuangan ke Pasar Digital: Strategi Usaha Perikanan Naik Kelas" Kerja Sama dengan Shopee

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Fasilitasi Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Kredit Program pada Triwulan I Tahun 2026

Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp. 000)	Realisasi Anggaran (Rp. 000)	Target Output		Realisasi Output		Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Persentase Realisasi Anggaran (%)
			TW I 2026	Tahun 2026	TW I 2026	S.d Tahun 2026	TW I 2026	Tahun 2026	
UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi literasi keuangan dan akses pembiayaan (UMKM)	753.839	263.448	30	750	30		100	4	34,95

Capaian UMKM Kelautan dan perikanan yang difasilitasi literasi keuangan dan akses pembiayaan pada triwulan I than 2026 sebanyak 30 UMKM, atau secara presentase jika dibandingkan dengan target pada triwulan I sebesar 30 UMKM maka tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 750 UMKM maka persentase realisasi terhadap target tahun 2026 sebesar 4%. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 263,448,184,- atau setara dengan 34,95% dari total pagu efektif sebesar Rp. 753,839,000

,-.

3.2.3 Sasaran Strategis 3

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IK3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit dan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha sampai dengan waktu pengukuran.

Berdasarkan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan Itjen KKP melalui Aplikasi SIDAK pada Triwulan I 2026, Nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Pemberdayaan Usaha sebesar 100% atau setara dengan 105,26% dari target triwulan I. Nilai tersebut diperoleh dari penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal tahun 2025 yang telah diselesaikan secara Tuntas dan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW IV terhadap target 2025
	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	95	95	95	100	100	100	105,26	105,26	105,26	105,26

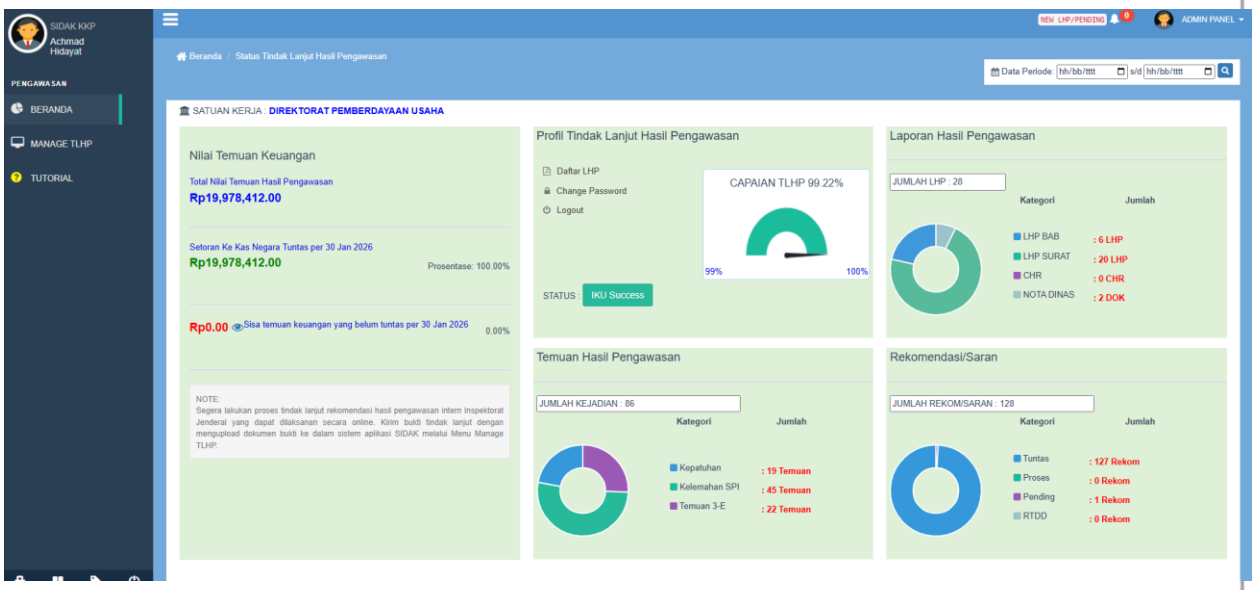

Gambar 32. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 31 Desember 2025

IK4. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Ditjen PDSPKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2026 ditargetkan 100. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2026.

IK5. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Secera teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥75.

Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Persentase Realisasi terhadap Target		Persentase Realisasi terhadap target 2026
	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	s.d TW I 2026	TW I 2026	TW I 2025	
Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75	75	75						

Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2026 ditargetkan sebesar 75. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2026.

Dalam rangka pencapaian target dimaksud, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya pemenuhan indikator kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal pada periode sebelumnya, melalui rapat koordinasi intensif pada masing-masing area dengan dukungan dari Sekretariat Ditjen PDSPKP, serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian WBK.

IK6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah evaluasi pengukuran kinerja dan reviu laporan kinerja bersama APIP yang pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum dapat dihitung nilai capaiannya pada triwulan berjalan.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi pada aplikasi Kinerjaku KKP yang mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2026 ditargetkan 86,2. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2026.

IK7. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bagian SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKP. Kegiatan pendukung untuk IKU ini adalah dalam bentuk pengembangan SDMA serta kegiatan monitoring dan evaluasi pada SDMA.

Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Realisasi terhadap Target	Persentase Realisasi terhadap

	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	s.d TW I 2026	TW I 2026	TW I 2025	target 2026
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	-	76	81,5						

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha) tahun 2025 ditargetkan sebesar 87. Indikator kinerja ini bersifat semesteran sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada semester I dan semester II tahun 2025.

IK8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)

IK9. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikutkan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Persentase Realisasi terhadap Target		Persentase Realisasi terhadap target 2026
	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	Sd Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha	1	1	1	2	2				

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2026 ditargetkan sebanyak 1 inovasi. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2026.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. Perhitungan perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Periode Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan nasional 2025-2029 yakni Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau,dan ekonomi biru serta Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Direktorat Pemberdayaan Usaha selama tahun 2025 telah melaksanakan berbagai program seperti upaya pemberdayaan kelompok usaha masyarakat, fasilitasi akses pembiayaan, pemetaan dan promosi investasi, pengembangan kewirauhaan dan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan dimana merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses pelaku usaha kecil terhadap sumber daya produksi serta mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Meskipun berbagai pencapaian positif telah diraih, kami menyadari masih terdapat berbagai tantangan dan kendala, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, maupun dinamika ekonomi global yang memengaruhi sektor kelautan dan perikanan nasional. Oleh karena itu, hasil evaluasi dari laporan ini akan menjadi landasan penting dalam perbaikan kebijakan dan strategi ke depan, guna

memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia.

4.2 Rekomendasi

Secara umum, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode mendatang antara lain:

1. Sosialisasi perizinan berusaha;
2. Pendampingan investasi kepada calon investor.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Kerja Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Catur Sarwanto**
Jabatan : Direktur Pemberdayaan Usaha

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Machmud**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Direktur Pemberdayaan Usaha
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Machmud	**Catur Sarwanto**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Investasi Kelautan dan Perikanan	1.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	14,47
2.	Meningkatnya UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas	2.	Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Omsetnya (Persen)	5,5
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95
		4.	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100
		5.	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86,2
		7.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	81,5
		8.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	81
		9.	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	6.518.952.000
Total Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2026	**6.518.952.000**

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Direktur Pemberdayaan Usaha
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Machmud	**Catur Sarwanto**

Lampiran 2.

Memorandum penyampaian capaian dan data dukung laporan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2026

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 334/DJPDSPKP.3/TU.140/IV/2026

Yth. : Plt. Direktur Jenderal PDSPKP
Dari : Direktur Pemberdayaan Usaha
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Realisasi Capaian IKU Level II, Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 10 April 2026

Dalam rangka pemenuhan pelaporan kinerja Ditjen PDSPKP periode Triwulan I Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pemberdayaan Usaha serta Laporan Kinerja (terlampir). Capaian kinerja tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden, khususnya Program Kampung Nelayan Merah Putih melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas usaha pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)

   Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan merupakan nilai total realisasi penanaman modal usaha sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari usaha penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan ikan, pergaraman, pemasaran/perdagangan, dan jasa perikanan, yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kredit Investasi (KI) pada triwulan I tahun 2026.

   Pada Triwulan I Tahun 2026, nilai investasi sektor kelautan dan perikanan diperkirakan sebesar Rp3,49 triliun atau tercapai 100% dari target triwulan I yang ditetapkan. Realisasi tersebut terdiri atas penanaman modal asing sebesar Rp0,80 triliun, penanaman modal dalam negeri sebesar Rp1,69 triliun, dan kredit investasi sebesar Rp0,92 triliun. Secara kumulatif, capaian ini telah memenuhi 24,12% dari target investasi tahun 2026 sebesar Rp14,47 triliun.

   Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 24,12% berada pada jalur yang sesuai target, didukung oleh realisasi rencana investasi tahun sebelumnya, khususnya penanaman modal dalam negeri dan kredit investasi yang telah siap dilaksanakan, serta meningkatnya penyaluran pembiayaan oleh perbankan. Selain itu, daya tarik usaha budidaya dan pengolahan yang memiliki pasar stabil turut mendorong minat penanaman modal, baik dari dalam maupun luar negeri, serta kemudahan perizinan yang mempercepat realisasi usaha. Dukungan Program Strategis Presiden melalui pengembangan kawasan seperti kampung nelayan, klaster budidaya, dan industrialisasi perikanan menjadi faktor utama karena

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

memberikan kepastian lokasi dan ekosistem usaha yang terintegrasi, sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat penanam modal.

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian nilai investasi diantaranya adalah menerbitkan Sertifikat standar yang telah diterbitkan berasal dari sektor pemasaran ikan yaitu PT Indo Mina Bahari dan PT Cendana Indo Pearls dan melakukan verifikasi lapangan terhadap perusahaan yang mengajukan izin karena case tertentu, dan akan melaksanakan rapat pembahasan pengembangan aplikasi Laporan Kegiatan Usaha (LKU).

2. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Omsetnya (Persen)

   Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Omsetnya merupakan persentase jumlah UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang meningkat omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan menuju UMKM Naik Kelas dibandingkan dengan Jumlah UMKM yang dibina.

   Pada triwulan I tahun 2026, target peningkatan omzet UMKM pengolahan ditetapkan sebesar 0,5% dari 855 UMKM terkurasi, atau setara dengan sekitar 5 UMKM. Realisasi menunjukkan bahwa 6 UMKM mengalami peningkatan omzet, sehingga capaian mencapai 120% dari target triwulan I.

   Jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 5,5%, maka capaian sementara ini setara dengan 10,91%. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

   Capaian indikator persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omzetnya pada Triwulan I Tahun 2026 didorong oleh strategi intervensi yang lebih terarah, dimulai dari kurasi UMKM dengan fokus pada pelaku usaha yang siap berkembang, serta pendampingan intensif pada aspek yang berdampak langsung terhadap penjualan seperti kualitas produk, pengemasan, dan pemasaran. Peningkatan omzet juga diperkuat melalui fasilitasi akses pasar, termasuk temu bisnis dan pemanfaatan platform digital, serta penguatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Selain itu, sinergi dengan berbagai pihak dalam memperluas akses pembiayaan dan distribusi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala, turut mempercepat capaian, dengan pendekatan percepatan pada UMKM yang telah siap naik kelas sebagai faktor kunci keberhasilan pada triwulan ini.

   Implementasi strategi tersebut didukung oleh berbagai kegiatan, antara lain peningkatan kapasitas kelembagaan usaha kelautan dan perikanan melalui pembinaan Koperasi Desa Merah Putih Mekarmukti Cihampelas dan Mekarsari Ciponggor di Kabupaten Bandung Barat, penumbuhan dan pembinaan wirausaha melalui bimbingan teknis kewirausahaan dan akses pembiayaan di Singkawang, Aceh Timur, Padang, dan Lampung Tengah, serta pelaksanaan business matching UMKM pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan dengan ritel modern. Selain itu, dilakukan pula fasilitasi literasi keuangan dan akses pembiayaan kredit program di Kabupaten Bandung sebagai bagian dari penguatan kapasitas usaha dan akses permodalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

   Nilai realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100% atau setara dengan 105,26% dari target sebesar 95%. Nilai tersebut diperoleh dari penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal periode triwulan I tahun 2026 yang telah diselesaikan secara Tuntas.

4. Realisasi Pengelolaan Anggaran

   Dalam mendukung capaian Indikator Kinerja tersebut diatas, Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2026 mengelola anggaran sebesar Rp. 6.518.952.000,-, dan Jumlah realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha selama periode triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 1,283,462,840,- atau setara dengan 19,68%.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami mengucapkan terima kasih.

Ditandatangani Secara Elektronik

Catur Sarwanto

Tembusan
Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 2.
Surat Nomor : 334/DJPDSPKP.3/TU.140/IV/2026
Tanggal : 10 April 2026

Tabel Capaian Direktorat Pemberdayaan Usaha TW I Tahun 2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran Pagu Dialoh	Satuan Output Komponen	Target	Rincian Target				Rincian Capaian				Persentase Output	Realisasi anggaran	Persentase Anggaran	Keterangan
						s/d Tw 1	s/d Tw 2	s/d Tw 3	s/d Tw 4	s/d Tw 1	s/d Tw 2	s/d Tw 3	s/d Tw 4				
1	Meningkatkan Investasi Kelautan dan Perikanan	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	700.815.000	Rp. Triliun	14,47	3,49	7,06	10,72	14,47	3,49	-	-	-	24,11	225.384.770	32,16	Realisasi pada triwulan I diperkirakan sebesar Rp 3,49 Triliun dari PMN, sebesar Rp 0,80 Triliun, PMDN sebesar Rp 1,69 Triliun dan Kredit Investasi (KI) 0,92 Triliun. Dalam rangka mendukung capaian tersebut telah dilaksanakan kegiatan: 1. Pengembangan Modelling Usaha Penimbangan Ikan di Desa Cukanggenteng, Kabupaten Bandung dalam mendukung operasionalisasi KDKMP 2. Pengembangan Modelling Usaha Kelautan dan Perikanan di Desa Pangkalnadan Kabupaten Cirebok dalam mendukung operasionalisasi KDKMP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 3

Lampiran 3.

Surat Nomor : 334/DJPDSPKP.3/TU.140/IV/2026
Tanggal : 10 April 2026

EVALUASI RENCANA AKSI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA
TAHUN ANGGARAN 2026

	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)	TARGET KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	TARGET OUTPUT BERKALA												REALISASI OUTPUT BERKALA												Permasalahan	Rekomendasi
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan			700,815																												
1	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha dan Investasi	420,666	3	Rekomendasi							1					3														
		Fasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran	147,694	30	Badan Usaha		1	3	5	6	8	9	10	11	12	13	30		1	4											
		Fasilitasi Pelaku Usaha yang dibimbingi dalam rangka Realisasi Investasi	132,512	15	Badan Usaha				1	1	1	2	2	3	3	5	15														
Meningkatnya Omset UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan			5,818,137																												
2	Presentase Peningkatan Omset UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	Fasilitasi Kemitraan Usaha KP	121,641	10	Kesepakatan				1	1	1	1	2	2	3	4	10														
		Peningkatan kapasitas Lembaga usaha KP	1,333,252	120	Lembaga			2	7	12	19	25	35	45	58	65	120			2											
		Pemumbuhan dan Pembinaan Wirausaha KP	420,065	400	UMKM	-	10	20	30	40	60	100	120	140	160	200	400		10	30											
		Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Permodalan	2,962,900	3,000	UMKM		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,400	3,000		100	300											
		Kolasi Usaha Kelautan Perikanan	226,420	250	UMKM			5	10	15	20	35	50	65	85	105	250			10											
		Fasilitasi Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Kredit Program	753,839	750	UMKM			30	50	100	150	200	230	270	300	350	750			30											
Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha																															
3	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Pendampingan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha		4	Laporan			1			2			3			4			1											
4	Presentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Pemenuhan dokumen tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha		1	Laporan												1														
5	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Pemenuhan dokumen untuk pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha		1	Laporan												1														
6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Pemenuhan dokumen Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha		1	Laporan												1														
7	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha		2	Laporan						1						2														
8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha	Peningkatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha		1	Laporan												1														
9	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha	Penyelepan Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha		1	Laporan												1														

Jakarta, April 2026
Direktur Pemberdayaan Usaha

Catur Sarwanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara